



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : III
Rapat Ke- : 11 (Sebelas)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 25 Januari 2022
Waktu : Pukul 11.20 WIB s.d. 16.20 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat : Sudin, S.E.(Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDI P)
Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021;
2. *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2022; dan
3. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022.
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
41 dari 53 orang Anggota dengan rincian:
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6 dari 11 orang Anggota
1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
2. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
3. Drs. I Made Urip, M.Si.
4. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.
5. Maria Lestari S.Pd.
6. Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.- Virtual
2. Fraksi Partai Golongan Karya
6 dari 8 orang Anggota
1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
2. H.M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
3. Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S.
4. Budhy Setiawan - Virtual
5. Alien Mus
6. Tetty Rohatiningsih, S.Sos.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
7 dari 7 orang Anggota
 1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 2. Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
 3. Ir. H.T.A. Khalid, M.M.
 4. Hj. Renny Astuti, S.H., S.PN.
 5. Dr. Ir. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc.
 6. Ir. Dwita Ria Gunadi - Virtual
 7. Dr. Azikin Solthan, M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat
5 dari 6 orang Anggota
 1. Rusdi Masse Mappasessu/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 2. Ir. Abdullah Tuasikal
 3. Julie Sutrisno
 4. Yessy Melania, S.E.
 5. Ir. Hj. Sri Kustina - Virtual

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
5 dari 6 orang Anggota
 1. Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 2. H. Muhtarom, S.Sos.
 3. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A. - Virtual
 4. Daniel Johan, S.E. - Virtual
 5. Edward Tanur, S.H.

6. Fraksi Partai Demokrat
5 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. Suhardil Duka, M.M.
 2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 3. Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.
 4. Muslim, S.H.I., M.M.
 5. Bambang Purwanto, S.ST., M.H. - Virtual

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
5 dari 5 orang Anggota
 1. drh. H. Slamet
 2. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
 3. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 4. H. Johan Rosihan, S.T.
 5. Saadiah Uluputty, S.T.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional
2 dari 3 orang Anggota
 1. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
 2. Haerudin, S.Ag, M.H.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
0 dari 2 orang Anggota

B. Anggota Izin

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

- 1) Riezky Aprilia, S.H.,M.H.

C. Pemerintah

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.);
2. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D.);
3. Sekretaris Jenderal sekaligus Plt. Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM (Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.);
4. Inspektur Jenderal (Ir. Laksmi Wijayanti, MCP.);
5. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.);
6. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ir. Wiratno, M.Sc.);
7. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum.);
8. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc.);
9. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A.);
10. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc.);
11. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M.);
12. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc.);
13. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ir. Ary Sudijanto, M.Sc.);
14. Kuasa Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si.);
15. Direktur Utama Perum Perhutani (Wahyu Kuncoro);
16. Direktur Utama PT Inhutani I (Oman Suherman);
17. Direktur PT Inhutani II (Ir. Bakhrizal Bakri, M.M.);
18. Direktur PT Inhutani III (Hezlysyah Siregar);
19. Direktur PT Inhutani IV (Sri Widodo); dan
20. Direktur Utama PT Inhutani V (Dicky Yuana Rady).

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Pertama kami mengucapkan selamat tahun baru 2022 semoga di tahun 2022 badai covid segera berlalu juga tidak terjadi banyak bencana alam akibat penggundulan hutan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajaran,
Yang terhormat yang mewakili Kepala Badan Restorasi Gambut.

Kepala Badan Restorasi Gambut izin hari ini karena lagi agak panas dingin isolasi di rumah.

Yang terhormat Direktur Utama Perum Perhutani beserta jajaran,
Yang terhormat Direktur Utama Inhutani I sampai dengan V beserta jajaran,
Hadirin yang kami hormati,

Mengawali rapat hari ini mari kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kita diberikan kesehatan, maka dapat mengadakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat walafiat.

Sesuai dengan jadwal acara rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi menjadi Bamus tanggal 6 Desember dan keputusan Rapat Internal Komisi IV tanggal 12 Januari 2022, pada hari ini Selasa tanggal 25 Januari 2022 Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka membahas:

1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021;
2. *Automatic Adjustment*, mohon maaf ini saya juga bingung pakai Bahasa Inggris ini, saya takut *disalahin* lagi nanti. Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2022;
3. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib, Rapat Kerja ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.20 WIB)

Rapat Kerja hari ini kita mulai pada Pukul 11.20 WIB dan akan diakhiri pada Pukul 16.20 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) tentang Tata Tertib atau kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kesimpulan Rapat;
6. Penutup.

Apakah acara dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Selama 2 tahun terakhir kita bekerja dan berkarya dalam suasana pandemi Covid-19 banyak sendi-sendi kehidupan dan mekanisme kerja yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi pada tahun 2021 sudah kita lewati dengan cukup baik, walaupun masih perlu perbaikan di sana-sini. Menghadapi tahun 2022 sektor lingkungan hidup dan kehutanan masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang belum selesai antara lain:

- Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat sampah limbah infeksius;
- Penataan kawasan hutan pasca UU CK;
- Penyelesaian Tanah untuk Reformasi Agraria (TORA) Perhutanan Sosial;
- Perbaikan kualitas lingkungan hidup; serta
- persiapan pembangunan ibukota negara.

Pemantapan skala prioritas program yang dirasakan diharapkan menjadi instrumen sektor dan fiskal agar menjadi pendorong serta menstimulasi perekonomian dan pembangunan nasional, disamping melindungi rakyat Indonesia dari pandemi saat ini sedang dialami oleh seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi IV meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala BRGM untuk menjelaskan realisasi kegiatan selama tahun 2021, termasuk hal-hal yang penting perlu dijadikan catatan untuk dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan pencapaian target 2022.

Bapak dan Ibu yang terhormat,

Sesuai dengan hasil sidang kabinet Paripurna tanggal 17 November 2021, Presiden memberikan arahan yang melakukan langkah strategi terhadap pada tahun 2022 dalam rangka mitigasi dampak berlanjut dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19 yaitu dengan melakukan pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) sebesar 5% pada tiap kementerian/lembaga. Untuk itu, Komisi IV meminta penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut

mengenai gambaran pencadangan anggaran di Kementerian LHK dan Badan Restorasi Gambut serta strategi pelaksanaan kegiatan tahun 2022, terutama dalam rangka melaksanakan tugas pokok menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup serta mengelola dan melestarikan hutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dalam kesempatan Rapat Kerja kali ini, Komisi IV meminta agar Saudari Menteri LHK dapat menyampaikan penjelasan mengenai Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan yang telah mencapai 192 izin usaha konservasi hutan dengan luasan 3,12 juta hektar. Pada Masa Persidangan II yang lalu Komisi IV telah menerima laporan:

1. Panja Komisi IV mengenai Pencegahan, Pengendalian serta Penindakan Kebakaran Hutan dan Lahan;
2. Panja mengenai Penggunaan Pelepasan Kerusakan Kawasan Hutan; serta
3. Panja Pencemaran Sampah dan Limbah.

Dan Komisi IV telah menyetujui beberapa rekomendasi ketiga Panja tersebut. Selanjutnya dalam Panitia Kerja ini akan disampaikan kepada Menteri LHK rekomendasi ketiga Panja tersebut, laporan Panjanya nanti saja setelah ada penjelasan.

Kemudian Indonesia khususnya Bali akan menjadi tuan rumah G20 (*G-twenty*). Saya mendengar dari beberapa pihak di sana masih terjadi penumpukan sampah di wilayah Suwung, Suwung itu perbatasan antara Kuta, Badung dengan Denpasar. Maka kami ada rencana sesuai dengan Panja Pencemaran Lingkungan dan Sampah, Kamis akan ke Bali.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Demikian pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudari Menteri LHK untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas. Dipersilakan.

INTERUPSI F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Sedikit, Pak Ketua.

Interupsi Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Abang datang belakangan langsung interupsi. Interupsi apa lagi?

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Bisa?

KETUA RAPAT:

Ya bisa *lah*, kalau *enggak* nanti katanya saya sentimen.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Baik.

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Ibu Menteri dan jajaran yang kami hormati,

Saya hanya mengingatkan, Pak Ketua. Dalam kesimpulan rapat beberapa waktu yang lalu kalau saya tidak salah kita *udah* minta data 3,2 juta lahan hektar. Apakah hari ini data tersebut sudah dilampirkan dari pihak Kementerian atau bagaimana?

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Yang lain? Mumpung nanti Ibu Menteri menjelaskan jangan dipotong, ada yang mau bertanya lagi? Supaya jangan ada yang dipotong di jalan nanti.

INTERUPSI F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pak, mohon izin.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Baik.

Terima kasih.

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Sebelum dilanjutkan Raker, Pak Ketua yang saya hormati dan Pimpinan, kita dibagikan satu lembar ini, Pak, satu lembar aspirasi yang mungkin sepintas nampaknya tulisannya kecil sehingga sulit dibaca. Ternyata bukan tulisannya saja, angkanya juga kecil begitu. Sehingga dalam kesempatan ini saya usul sebelum dilanjutkan mungkin alangkah baiknya kalau tidak di forum ini dijelaskan mungkin juga apakah diskorsing sebentar. Karena ini menurut saya penting, karena ini terkait dengan aspirasi dan kita juga bicara tentang ada 2023 *kan* pembahasan hari ini. Itu usulan saya, sehingga kita tuntaskan dulu ini, ini masalah komitmen soalnya.

Terima kasih, Pak Ketua, atas waktunya.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Oke.

Sekretariat, saya minta sekarang di-*print* dengan kertas yang besar agar lebih jelas, kemudian dibagikan ke Anggota.

Menjawab pertanyaan Pak Salim tersebut mengenai 3,2 juta hektar, saya hanya menerima keterlanjuran 713.000 hektar, bukan 3,2. Setahu saya, seingat saya untuk Kalimantan Tengah *aja* 830.000 hektar, Kalimantan Tengah, belum Riau, belum Kalimantan Selatan, belum Papua, belum Jambi, dan beberapa Provinsi lainnya. Hal ini saya mohon sebelum penyampaian Saudari Menteri saya minta dijawab dulu.

INTERUPSI F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Sedikit, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sabar, saya *ngomong* dulu *dong*, Bang.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Saya sambung *aja* terus, Pak Ketua, supaya jangan bertele-tele. Sama Pak Ketua sudah ada data 700?

KETUA RAPAT:

Ini baru diserahkan.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Nah kenapa sama kami tidak ada? Apakah Komisi IV ini hanya Ketua di situ, mohon maaf.

KETUA RAPAT:

Ya, makanya itu saya belum membagikan ini karena data ini saya anggap belum valid ya. Apa mau saya suruh buat konflik *aja* lagi nanti tempat Abang? Jadi silakan Menteri menjawab dulu pertanyaan hal ini, yang 3,2 *kok* datanya cuma 713.000 hektar. Saya selintas membaca kayaknya banyak sekali kejanggalan. Memang *enggak* dibagi.

Silakan Menteri menjawab.

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota yang terhormat,

Saya baru cek ke Pak Sekjen, data yang 700.000 hektar itu adalah data yang sudah diterima oleh KLHK karena, *udah* diterima oleh KLHK karena begini, 3,2 juta hektar itu adalah informasi indikatif, jadi informasi indikatif dari hasil kerja Inpres sawit. Inpres sawit ini dikontrolnya oleh Menko Perekonomian, *nah* itu indikatif 3,2. Kemudian data 700.000 ini menurut Pak Sekjen data yang sudah terkonfirmasi catatan-catatan dari masyarakat. Jadi itu data yang sudah *fixed*.

Kita, Kementerian, tidak bisa mengatakan bahwa ini legal atau tidak legal apabila datanya konfirmasinya belum masuk. Jadi kalau itu persoalannya saya akan cek lagi, kalau bisa yang indikatifnya, Pak Sekjen. Karena kalau dia indikatif berarti masih harus ada konfirmasi. Konfirmasi itu bisa dilakukan setelah ada undang-undang mereka harus menyelesaikan persoalan legal atau tidak legal ini mereka menyurati ke KLHK, jadi begitu posisinya, Ketua. Jadi saya kira, silakan, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu, di sini ya kita lihat, saya ke Kalimantan Tengah dengan Dirjen Gakkum, ada PT Best, ada PT Ginting, ada PT apa dan sudah disebutkan ilegal tapi tidak ada di sini datanya, ini yang saya pertanyakan. Ada Wilmar, ada Sinar Mas di sana, banyak lainnya, tidak ada. Saya cek kemarin satu-satu. Jadi *kok* nampaknya ini, mohon maaf ini, sepertinya *kok* pilih kasih. Dirjen, betul Dirjen Gakkum kita pernah *ninjau* pakai helikopter? Dan diakui oleh Saudara Gubernur Kalimantan Tengah tidak punya pelepasan, dua titik, termasuk juga laporan Saudara Gubernur, ini ada Wilmar, ini ada Sinar Mas, ini ada ini. Jadi kalau bilang tidak ada indikatif ini *kan* bohong. Saya minta kejujurannya. Saya di sini juga bukan mencari siapa salah siapa benar, tetapi kita memperbaiki yang kurang baik, ini *loh* yang saya inginkan.

Ya silakan, Mbak Luluk, mau *ngomong* apa, 1 menit.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.,M.P.A.):

(*suara tidak terekam*) bersikap keras, ini tanggung jawab kita bersama.

Terima kasih.

INTERUPSI F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Bapak nular, ikut?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Iya, silakan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya begini, Bu Menteri, menurut saya jawaban Bu Menteri itu seperti terkesan tidak ada koordinasi dengan Menko. Sebenarnya Komisi IV di dalam kesimpulannya itu, itu Kementerian dalam jangka waktu 7 hari saat itu data tentang perusahaan-perusahaan yang bermasalah dan terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua ini, ini harus sudah kita terima Anggota Komisi. Tapi sampai sekarang kami *enggak* terima *nih*, Pak Ketua, maaf ya. Jadi ini di mana *slack*-nya ini, itu yang pertama.

Yang kedua ini ada anggaran *Adjustment Automatically*, iya *Automatic Adjustment*. Saya minta nanti ini kalau anggaran ini kalau nanti tiba waktunya itu dialokasikan *aja* untuk kegiatan program berbasis masyarakat.

Demikian, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Kanjeng? *Udah*.

Jadi ini saya mohon maaf, data ini saya *enggak* bisa terima. Saya pernah memanggil PT Genting, PT Best, mereka mengakui belum ada pinjam pakai, belum ada pelepasan. Tapi tidak ada tindak lanjutnya, baik Planologi maupun Gakkum tidak ada yang *ngomong*, tidak ada yang bertindak, ini *loh* masalahnya. Saya *tuh* maunya kita *kan* mitra, saling terbuka, saling jujur, saling mencari jalan terbaik, pengusaha tidak boleh dirugikan, tapi negara juga tidak boleh dirugikan, iya *kan*. Waktu itu *tuh* terakhir saya RDP dengan Sekjen mengatakan dari 3,2 juta hektar ada *enggak* yang sudah disetujui pelepasannya? Belum ada. Masih ada rekamannya, kalau perlu nanti kita buka, tapi ini hanya 713.000. Ya, saya bingung mau dilanjutkan atau tidak masalah ini kalau datanya ini *enggak* lengkap.

Jadi Menteri silakan jelaskan dulu ya sampai sejelas-jelasnya, karena tadi kalau saya bilang *nunggu* pengaduan masyarakat. Orang Dirjen Gakkum *aja* tahu *kok* kedua titik naik helikopter, Planologi juga pasti tahu, *enggak* mungkin *enggak* tahu. Tolong jangan sembunyikan-sembunyikan data. Saya

juga kecewa dengan Dirjen Planologi kemarin kita ke Kaltim, ke Kaltim terus saya presentasi saya bilang, "Ayo kita makan siang, Pak Dirjen." Mohon maaf, saya *enggak* pernah dibayari makan sama Kementerian, itu *aja* ya.

Silakan, Menteri.

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih.

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Kawan-kawan jajaran eksekutif,

Kami juga menyampaikan rasa syukur pada Tuhan atas karunia dan terima kasih atas undangan Rapat Kerja hari ini dan sebelumnya izinkan kami melaporkan.

INTERUPSI F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Sedikit, Pak Ketua. Interupsi, Pak Ketua.

Ini Ibu meneruskan atau dijawab dulu masalah 3,2 antara 700 tadi *clear* maunya atau kapan diapakan. Kita bukan, kita juga paham, Pak Ketua, Ibu Menteri juga *kan* tidak hafal semua ini. Ibu Menteri *kan* mempunyai staf, *kan* harus ada apa. Ini belum *clear* ini dilanjutkan, rapat apa namanya ini, Ketua?

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, dijawab dulu *lah*, Bu Menteri, biar *clear* masalahnya. Karena waktunya ini waktu itu, RDP terakhir tanggal berapa itu? RDP terakhir tanggal berapa kesimpulannya? Tampilkan.

INTERUPSI F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Ketua, Ketua, Sebelah kanan, Pak.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak Andi.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Terima kasih, Ketua.

Jadi kalau saya pribadi melihat, Ketua, sebenarnya Kementerian LHK punya data lengkap sebenarnya, karena yang berikan izin kan mereka, yang mengawasi mereka juga *kan*, sehingga saya rasa angka 3,2 juta itu tidak sulit untuk kita dapatkan kalau memang ada kemauan, Ketua. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya berharap juga bahwa di Komisi IV juga ini kita perlu data, Ketua. Bukan hanya pelepasan, tapi penggunaan kawasan melalui apa namanya izin penggunaan kawasan ini banyak bermasalah. Dikasih izin 10.000 hektar nambahnya 20.000 hektar. Ini saya kira kita banyak dapat laporan di Komisi IV, Pak Ketua, untuk tambak maupun untuk perkebunan.

Saya kira demikian, Ketua.

KETUA RAPAT:

Mana, yang nomor berapa yang masalah data? *Nah* ini poin 5.

5. Komisi IV meminta pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data terbaru:
 - a. Data nama-nama perusahaan perkebunan di dalam kawasan hutan yang belum mendapatkan izin pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan.
 - b. Data nama-nama perusahaan yang belum membayar kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Karena yang saya tahu hampir berapa, hampir 300, 400 belum membayar. Selambat-lambatnya 1 minggu setelah Rapat Dengar Pendapat ini. Tanggal berapa ini?

INTERUPSI F-PKS (drh. H. SLAMET):

Interupsi, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ini berarti *udah* 1 tahun, 2021 sampai 2022.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Interupsi, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya, Pak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Baik.

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini karena kesimpulan ini *kan* dibuat berdua, artinya kesepakatan antara Komisi IV dan mitra, sehingga ketika ini juga masalah saling menghargai antara lembaga kita. Dan terus terang ketika kemudian ada kesepakatan yang tidak jalan dan kemudian rapat ini tetap berjalan, ya pelecehan akan terjadi antar lembaga itu. Oleh karena itu, saya mengusulkan konkret rapat di-*pending* sampai kemudian data itu ada.

Terima kasih, Pak Ketua.

INTERUPSI F-P.GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Pak Ketua, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak.

F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Ini *kan* saya sebenarnya sependapat dengan apa yang disampaikan PKS tadi. Ini kesepakatan kita bersama ini. Kenapa, saya mau bertanya, kenapa hasil kesepakatan ini tidak dijalankan? Jadi kalau ini yang hasil kesepakatan awal saja tidak jalan, bagaimana dengan hasil kesepakatan yang akan datang. Maka saya minta Komisi IV ini *clear*-kan dulu, jadi harga setiap keputusan kita di sini.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Bapak/Ibu sekalian,

Ya, sedikit, Pak Ketua.

Saya menghargai masukan dari teman-teman semua ya. Tapi apa yang kita bahas sekarang ini *kan* sebenarnya adalah bagian dari pembahasan Panja Pelepasan Perusakan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Saya kalau boleh usul ya, kita semua mendengarkan *nih* keresahannya teman-teman. Saya rasa Ibu Menteri dan teman-teman Eselon I juga sudah bisa mendengarkan, sudah bisa melihat *lah*. Tapi kalau saya boleh usul kita teruskan Rapat Kerja kita hari ini, kita mendengarkan penjelasan dari KLHK. Bu Menteri menyampaikan presentasinya ya, setelah itu ya kita lihat nanti jalannya bagaimana ya.

Sesuai dengan rapat undangan kita hari ini ya kita bahas ada agenda-agenda tertentu. Bahwa ada kesimpulan yang kita pandang itu tidak dijalankan bisa nanti menjadi bahan argumentasi kita, perdebatan kita di dalam rapat ini. Tapi mari kita jalankan dulu Rapat Kerja kita hari ini ya, kita minta mitra memberikan penjelasannya. Boleh kita sepakati?

INTERUPSI F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Sedikit, Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Ya, Pak Salim.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Saya sepakat dengan Pimpinan dan harus juga kita respon dari rekan-rekan. Kita sepakat kita teruskan, cuma ada jawaban konkret dari pihak Kementerian data ini kapan, 3 hari kah, seminggu kah. Kita juga sepakat apa yang dianjurkan oleh Pimpinan. Cuma lembaga ini pun dihargai, Pak Ketua, supaya ada solusi jalan tengah yang kita ambil.

Terima kasih, Pak Ketua.

INTERUPSI F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Izin, Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan.

F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Saya tidak dalam kapasitas untuk memberi pendapat dilanjutkan atau tidak. Saya dalam kapasitas meminta pertanggungjawaban hasil kesepakatan itu bagaimana, mohon penjelasan dulu. Kalau memang itu ternyata Bu Menteri atau Kementerian *oh* ini *enggak* sanggup memang, bilang, kita ubah perubahan itu, apa namanya kesimpulan itu. Jadi agar semua kita di sini apapun yang kita simpulkan mulai hari ini dan ke depan dengan pikiran yang jernih, jangan asal-asal buat kesimpulan. Lembaga ini lembaga terhormat, kalau kita sendiri tidak menghormati lembaga ini siapa lagi yang mau menghargai? Masa kesimpulan rapat *enggak* jalan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Khalid, ini kesimpulan *kan* kesepakatan bersama seperti Pak Slamet, ya tidak mungkin *enggak* pakai akal sehat. *Kan* ini *udah* kesepakatan dibacakan. Maksudnya *enggak* ada? Ya ini nanti kita tanyakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Makanya kita terima semua masukannya. Kalau bisa tidak interupsi lagi. Mari kita dijelaskan dulu.

KETUA RAPAT:

Dijelaskan dulu. Atau kita balik ya, rekomendasi Panja dibacakan dulu.

INTERUPSI F-PKS (drh. H. SLAMET):

Izin, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Jadi saya pada tetap pendapat pertama dan saya mewakili PKS bahwa di situ kita minta itu *kan* dua minggu setelah Rapat Dengar Pendapat, bukan mendapatkan penjelasan, sehingga kami tetap data itu harus kita dapatkan. Kalau tidak rapat usul kami diskorsing. Kalau tetap jalan kami PKS akan *Walk Out* dari rapat hari ini.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Iya, kami persilakan.

INTERUPSI F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Izin, Pak, izin.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Ya, silakan, Pak Johan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Menempatkan kata selambat-lambatnya pada angka 5 itu, itu *kan* syarat, Pak, dan itu kita buat bersama *gitu*. Jadi penuhi dulu syaratnya *kan* baru kita bisa melanjutkan. Jadi jangan dibalik-balik.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Oke, oke, kami terima, Pak. Saya minta tidak ada interupsi lagi. Kita dengarkan dulu dari mitra kerja penjelasannya mengenai...

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Mohon maaf, Pak Ketua. Anggota sudah berpendapat *kok* tidak didengar?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Loh, kita sekarang meminta penjelasan. *Kan* sekarang semua sudah mengutarakan apa yang menjadi keresahan bahwa ini tidak dilaksanakan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Beberapa Anggota minta ini jangan dilanjutkan, Pak Ketua. Kita *break* dulu rapat konsultasi misalnya kita lanjutkan atau tidak. Jangan buat keputusan sepihak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Saya minta kebijakan teman-teman semua kita dengarkan dulu. Kalau masih tidak memuaskan, ayo, kalau perlu silakan kalau ada yang...

INTERUPSI:

Konsultasi dulu, Ketua, dengan Kapoksi, dengan Pimpinan. Jangan dilanjutkan dulu.

INTERUPSI F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Pimpinan, interupsi, Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Kalau menurut saya *sih* kita bijaksana. Ini *kan* ini *crowded nih* pembicaraan ini. Antar Poksi kita bicara dulu terbatas, a, b, c, d-nya kita bisa berjalan, *kan* paling tidak 15 menit a, b, c, d-nya kita selesaikan, ketimbang kita bolak-balik seperti ini dilihat publik, kesepakatan belum punya kita.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Saya minta pendapat teman-teman sekalian *nih*, tadi ini sudah ada keresahan, oke, tapi kita dengarkan dulu penjelasannya seperti apa. Kalau masih tidak memuaskan barulah kalau ada yang mau *Walk Out* silakan *Walk Out*, kita tidak menghalang-halangi kebebasan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Bukan begitu, Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Pimpinan, Pimpinan, saya...

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Saya ingin mengingatkan Pimpinan saja, di rapat ini *kan* kita itu bukan anak buah, kita *tuh* kolektif kolegial.

KETUA RAPAT:

Saya paham, Pak, saya paham. Bapak Anggota sama dengan kami, kami cuma mengatur rapat.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Ya tapi *enggak* perlu sebutkan anak buah *dong*.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Oke kalau begitu. Kita *kan* Poksi-poksi sudah minta *nih* berapa *nih*, kita minta dibicarakan di internal Poksi kita. *Kan* tinggal aspiratif, *kan* sederhana, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Tadi *kan* dijelaskan Pak Budi, Menteri menjelaskan dulu, kalau kurang puas baru kita *break*, iya *toh*.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Kan kita bicara mekanisme, kita mau lanjut atau tidak. Ada yang minta data dulu baru lanjut, ada yang mau silakan jelaskan dulu, baru kita mempertimbangkan *break* atau tidak. *Nah* kalau kita garis tengah *nih*, antar Poksi kita kumpul dulu kita sepakati a, b, c, d-nya.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Pimpinan, boleh saya masuk?

INTERUPSI:

Sebentar dulu, Bu. Bu, sebentar.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Saya sudah absen dari tadi.

INTERUPSI:

Oh udah absen.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik.

Saya pikir saya setuju dengan Ketua, jadi kita *dengerin* dulu. Tadi saya kalau misalnya boleh *enggak* kasih waktu Ibu Menteri 10 menit paling tidak, sampai saya *nawar* 15 menit *lah* atau berapa menit untuk menjelaskan. Jika memang tidak menjawab semua pertanyaan Bapak/Ibu sekalian ya *enggak* apa-apa kita lakukan misalnya *break* atau seperti apa. Begitu, Pimpinan.

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih, Ketua.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,

Ini yang ditayangkan ini hasil RDP ya? Iya, Pak Sekjen? Oke. Saya kira kita di dalam Rapat Kerja itu selalu diberikan jadwalnya apa, materinya apa. Saya terus terang *enggak, enggak*, belum tahu bahwa akan ada penjelasan rekomendasi Panja dan lain-lain dan hasil Panja juga kita belum tahu juga. Saya juga belum tahu ada materi-materi Panja yang akhirnya seperti ini. Jadi, Pak Ketua, apakah hasil Panjanya juga sudah ada pengesahan dari Rapat Kerja dan apakah sudah dibawa ke Rapat Kerja?

Jadi terlepas dari data yang belum selesai, saya kira ini memang mungkin ada komunikasi yang tidak pas. Ada perbedaan definisi, ada perbedaan kriteria dan lain-lain dan itu *enggak* dijadwalkan sebetulnya di dalam Rapat Kerja ini, Ketua. Jadi saya kira *kan* ada tata tertibnya Rapat Kerja itu. Jadi saya *kan* diundang untuk Rapat Kerja tentang evaluasi anggaran dan rencana untuk 2022. Kalau khusus, kalau boleh saya minta di-Rapat Kerja-kan khusus saja tentang hasil-hasil Panja ini, Ketua.

Saya kira itu, Ketua, dari kami.

Terima kasih.

INTERUPSI:

Pimpinan...

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Izin Ketua dulu, saya menyampaikan.

Kita ini tidak dulu menumpuk berbagai masalah, jadi kesimpulan lagi, jadi kesimpulan lagi, jadi kesimpulan lagi, sehingga rapat kita tidak menjadi tumpukan kertas atau tumpukan angka-angka kesimpulan yang tidak ada hasil di publik. Saya pikir kita ada Panja, sudah ada kesimpulan. *Nah* tadi Pak Ketua membuka Rapat Kerja ini dengan pernyataan dan pertanyaan tentang data. Antara data yang selama ini kami miliki dan kita punya pakar data di sini, mantan Dirjen, selalu memberikan data yang *up to date* dengan data yang disampaikan oleh Kementerian.

Saya paham *lah*, sama dengan kami juga di DPR, pasti ada aspek-aspek psikologis di luar aspek teknis yang tidak mungkin Ibu jelaskan dalam forum terbuka, karena Ibu juga di balik itu ada kewenangan-kewenangan yang dimiliki secara struktural lebih tinggi dan bisa jadi lebih berwenang dibanding seorang menteri.

Untuk itu, saya lebih menyepakati, mudah-mudahan teman-teman menerima, sebelum Ibu paparan baru lagi tentang materi Rapat Kerja Ibu jelaskan *deh*. Kalau memang perlu penjelasan terbuka ya terbuka ini *loh* masalahnya. Tapi kalau memang perlu penjelasan tertutup, saya ingin *jelasin deh* secara tertutup masalahnya ini, dipersilahkan barangkali 5-10 menit, sehingga sebelum kita membahas materi yang lain dengan kesimpulan yang lain, kita sudah punya pijakan awal untuk bahan kami. Termasuk nanti tanggal 28 kita ke Riau, mohon Dirjen Penegakan Hukum dan Planologinya mendampingi. Karena kita tidak ingin bikin Panja, bikin Kunspek itu tidak menghasilkan apapun negeri ini tanpa perubahan.

Itu saja barangkali, Bu.

Terima kasih.

5-10 menit *mangga*, Bu.

INTERUPSI F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Pimpinan, izin Pimpinan.

Terima kasih, Pimpinan.

Saya melihat dua sisi. Sisi pertama memang keputusan-keputusan rapat kita di komisi harus dipatuhi, karena itu adalah marwah dari kita sebagai Anggota Dewan. Jika sekiranya Ibu Menteri sengaja tidak memberikan data kepada kita, saya berpendapat tidak perlu kita lanjutkan rapat ini. Tapi saya juga melihat Ibu Menteri tidak tahu tentang ini, *enggak* tahu, tidak tahu bahwa dia diminta data. Kalau tidak tahu masa' kita mau salahkan. Jadi kalau memangnya Ibu Menteri sengaja ya jangan rapat *dong*, karena marwahnya kita rendah. Tapi Ibu Menteri tidak tahu jawabannya. Ibu kalau memangnya tidak

tahu bahwa dimintai data seperti itu ya kita harus minta lagi kapan dia berikan kita data itu, karena hari ini baru dia tahu. Iya.

Saya kira demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

INTERUPSI F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Pimpinan, izin, Pimpinan. Diizinkan? Sebentar *aja*.

Sebetulnya kita ini memahami apa yang Ibu Menteri sampaikan, tapi juga sangat menyesalkan dengan apa yang terjadi di internal di sisi komunikasi di internal KLHK itu. Bayangkan, *mandatory* undang-undang konstitusi membuat kita Panja dan itulah kewenangan kita yang dimiliki oleh Undang-Undang Dasar '45. Jadi kita punya Panja, keputusan Panjanya Bu Menteri tidak tahu dan keputusan kita juga punya pelaksanaan undang-undang RDP sampai keputusan juga itu adalah undang-undang dan Ibu Menteri juga tidak tahu, itu justru kalau menurut saya itu lebih jauh bermasalah bagi marwah konstitusionalitas kita itu sebetulnya. Hanya ini mengingatkan saja.

Terima kasih, Pimpinan.

INTERUPSI F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua, Hermanto, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Oke, saya sudah paham, menteri menjelaskan. Nanti kalau masih kurang jelas teman-teman, kita *break*, kita bicara lagi dilanjutkan atau tidak.

Silakan, Bu Menteri, lanjutkan.

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Izin, Ketua. Saya menjelaskan yang mana jadinya *nih*? Saya harus dalam dulu apa yang terjadi.

Pak Ketua, saya mohon izin, informasi yang dilaporkan kepada saya bahwa 3,372 juta hektar itu, itu untuk KLHK adalah polygon-polygon, jadi belum ada namanya satu persatu, ini menurut info teknis.

KETUA RAPAT:

Maksudnya nama satu persatu, Bu?

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Iya, nama si A, si B, si C, dan sebagainya.

KETUA RAPAT:

Oh Gakkum aja tahu, Bu. Tanya Gakkum, tahu enggak tuh 30.000 hektar, termasuk asing punya. Kalau bilang enggak tahu namanya ya buat apa kita kunjungan kerja ke Kalteng.

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Kalau *gitu* berarti saya minta izin untuk merampungkan dulu yang soal data ini di dalam, Ketua. Karena di dalam laporan yang sampai kepada saya bahwa 3,37 itu, itu 713.000 yang datanya sampai ke Ketua itu yang sedang didalam proses penyelesaian, jadi *udah* terkonfirmasi polygon-polygonnya.

KETUA RAPAT:

Yang lain?

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Yang lain belum berproses konfirmasi datanya.

KETUA RAPAT:

Kami pernah memanggil PT Best dan Genting, mereka sudah mengajukan. Waktu itu Pimpinan saya, Pak Edi Prabowo di sini. Kami sudah mengajukan, cuma belum ada penyelesaian. Nanti kalau *gitu* kita panggil *aja* perusahaannya, mana yang salah mana yang benar baru kita tahu.

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Prosedurnya memang seperti itu, Ketua. Jadi yang ada indikasinya kalau di dalam regulasinya *sih*, Pak Sekjen, dia minta ya, dia ke kita, dia minta itu diproses.

KETUA RAPAT:

Tetapi di sini tidak ada. Yang saya katakan antara lain dua PT itu. Kurang lebih hampir 60.000 hektar ini, tidak ada penegakan hukum, tidak ada penyegelan, bahkan di dalam kawasan tersebut sudah ada pabrik. Waktu itu masih saya ingat, saya tanyakan, "Anda bayar PBB tidak?" Jawabnya, "Bayar." "Alas haknya apa anda membayar PBB? Itu tanah milik Kehutanan, bukan milik anda", ini *loh*.

Kok nampaknya mungkin Pak Sekjen juga kurang koordinasi sama Menteri, Eselon I juga harusnya ada koordinasi sama menteri, melaporkan hal-hal yang ditinjau, dilihat. Jadi percuma *aja* kita ada Kunspek, ada temuan, ada apa, ada apa. *Gimana*, Pak Budi?

INTERUPSI F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Interupsi, Pimpinan. Boleh? Sebentar, kalau interupsi terus saya harusnya langsung kita ini.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Tapi karena kita etikanya orang nusantara, orang Indonesia, jadi begini.

Pak Ketua, begini, *kan* komunikasi yang seperti itu dalam konteks Rapat Kerja kita tentu tidak nyaman ditonton publik. Tapi justru akan saling menjaga marwah kita bersama kalau kita dibicarakan di ruang terbatas dulu. Selesaikan pembicaraan tahapan-tahapan kita itu, baru di ruang ini. Ini *kan* untuk mengajukan secara teknis bahwa ini sudah pantas kita itu *break* rapat itu, daripada rapat kita seperti ini.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Atau *gini aja*, saya ambil jalan tengah. Bu Menteri tadi bahas laporan 2021-2022, setelah itu baru menjelaskan masalah ini. Mungkin, mungkin nanti Sekjen telepon ke sebelah minta data. Kalau datanya dia belum ya *stop udah*. Ya? Tolong jangan interupsi lagi.

INTERUPSI F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Bukan, Pak Ketua, menegaskan yang terakhir tadi itu.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Nelpon ke sebelah kalau datanya, bagaimana datanya ada Bu Menteri *ndak* tahu.

KETUA RAPAT:

Sekjen ada pasti.

Iya, silakan.

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Saya kalau *gitu* mohon waktu *aja* untuk mengkonsolidasikan beberapa hari, Ketua. Saya kira saya harus lihat betul persisnya apa. Karena apa namanya dari 3,2, 700, 2,6 dan lain-lain itu ada beberapa kategorinya. Memang mengapa terjadi hal seperti itu, karena memang banyak *dispute* regulasi juga di waktu yang lalu. Jadi misalnya tata ruangnya boleh ternyata itu hutan, misalnya seperti itu, dulu Kabupaten boleh kasih izin ternyata berapa tahun kemudian Kabupaten *enggak* boleh kasih lagi *gitu*. Jadi ada hal-hal *dispute* regulasi, Pak.

KETUA RAPAT:

Iya, iya, itu emang iya, saya paham, saya paham.

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Jadi saya mohon waktu, kami konsolidasikan dulu internal persisnya seperti apa, lalu yang diminta apa, saya nanti akan gali lagi yang RDP-nya lebih detail, Ketua. Jadi saya mohon waktu *aja*, Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi mohon waktu, rapat kita...

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Khusus yang untuk ini, Ketua.

KETUA RAPAT:

Oh khusus untuk ini?

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Khusus yang untuk kasus ini saya mohon waktu, tapi saya kira Rapat Kerjanya khusus 2021-2022 kita bisa lanjutkan.

Terima kasih, Ketua.

INTERUPSI F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Pimpinan.

Di sini, Pak.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Iya, saya kira bahagian yang ini kita sepakati untuk dikasih kesempatan Ibu Menteri waktu. Tapi jangan lama ya, Bu Menteri. Iya. Ini sudah selesai.

KETUA RAPAT:

Oke, *gini aja*, saya paham. Jadi tetap dilanjutkan...

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ya, jadi 2021 jangan diganggu, Pak.

KETUA RAPAT:

Minggu depan ya kita jadwalkan hari Rabu atau Kamis, karena Senin Selasa, *eh* Selasa itu libur, Kang Dedi mau Imlekan hari Selasa. *Oh* Pak Budi juga?

INTERUPSI F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Baik.

Karena Pak Ketua sudah memutuskan, sehingga saya tetap berkeputusan kepada kesimpulan rapat kita sebagaimana tadi itu adalah marwah dari kita saling menghargai dan kami berpendapat itu menjadi penting untuk saling menghormati dengan keputusan-keputusan yang kita sudah tulis bersama. Oleh karena itu, kami menganggap bahwa rapat ini ya harusnya sepakat dengan itu, sehingga kalau dilanjutkan kami mohon izin untuk tidak menyertai rapat ini.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Oke. Terima kasih, Pak Slamet.

Lanjutkan Bu Menteri.

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih, Ketua. Terima kasih.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,

Saya mohon.

Terima kasih atas undangan Rapat Kerja hari ini dan izinkan saya sebelum melaporkan beberapa hal, kami melaporkan bahwa ada Dirjen baru, personilnya yang baru untuk KLHK yaitu Ibu Diah Murtiningsih, Direktur Jenderal DAS dan Rehabilitasi Hutan. Dan juga ada Direktur yang personilnya baru Direktur Jenderal yaitu Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan, Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Bapak Sigit Reliantoro. Kemudian ada Kepala Badan Standardisasi dan Instrumen yaitu Bapak Ary Sudjianto. Badan ini adalah badan baru setelah Litbang dan Inovasi masuk ke BRIN, tugasnya memfasilitasi standard NSPK, asistensi kepada K/L untuk aspek-aspek lingkungan, persetujuan lingkungan, Amdal dan lain-lain, juga asistensi daerah untuk hal yang sama, dan dia juga bertugas untuk semacam pembinaan tapi dikaitkan dengan standard. Jadi kalau di KLHK itu ada Direktur Jenderal sebagai pembina teknis, lalu ada pengawas standard yaitu BSI, baru kemudian ke Gakkum.

Pimpinan yang kami hormati,

Bahan Rapat Kerja telah kami laporkan secara tertulis yaitu berkenaan dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021, kemudian termasuk kemudian tentang *Adjustment* 2022 pencadangan, lalu rencana program 2022, serta berkaitan dengan SK tentang pencabutan izin kawasan hutan.

Kita masuk ke *screen* 6.

Pimpinan yang kami hormati,

Bahwa sasaran tahun 2021 untuk Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencakup aspek lingkungan, aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola. Jadi mohon periksa pada halaman 6 dan kalau kita lihat ukuran-ukurannya pada *screen* berikut yaitu indeks kualitas lingkungan, kalau lihat grafiknya pada dasarnya dari tahun ke tahun relatif meningkat.

Di sisi lain yang menjadi perhatian juga pada *screen* berikutnya yaitu deforestasi dan sampai dengan sekarang pada dasarnya dari tahun ke tahun juga deforestasi menurun.

Kemudian pada *screen* berikutnya di pengendalian perubahan iklim kita juga tidak tertinggal kalau dilihat pada konfigurasi internasional. Dan pada *screen* berikut terkait dengan sirkular ekonomi tadi catatan yang terhormat Ketua untuk Bali kami perhatikan, Ketua, dan memang ada rencana untuk Hari

Peduli Sampah Nasional kita akan konsentrasikan di Bali, nanti kami laporkan kembali. Kemudian sirkular ekonomi ini akhirnya juga secara nasional maupun internasional dia menjadi *mainstreaming* karena dari sampah menjadi sumber daya.

Secara kenyataan juga pada *screen* berikutnya di halaman 11 berkembang juga usaha-usaha dari apa namanya siklus ataupun pemanfaatan dari sampah, demikian pula dari limbah di halaman berikutnya.

Kemudian yang di lapangan juga berkembang dan meluas yaitu alternatif pengelolaan dengan maggot, jadi ini semacam untuk pupuk dan pupuk cair. Jadi kelihatan sekali dan kita sudah mulai memfasilitasi bahwa sampah itu bisa menjadi sumber daya, kemudian kita dukung, bisa kita lihat pada halaman 14 dan 15.

Agenda lain dalam rangka indeks kualitas tutupan lahan mohon periksa pada halaman 16 yaitu pemulihan daerah aliran sungai dalam *chart* 16 ini terlihat juga dari tahun ke tahun untuk terus meningkat. Kemudian di sisi lain sebagaimana selalu didorong oleh Komisi IV Pimpinan dan Anggota yang terhormat untuk penegakan hukum. Jadi datanya di halaman 17 itu menunjukkan selama 5 tahun kita 6.000 kasus ditangani, sanksi dan juga baik administratif perdata dan pidana.

Pada aspek ekonomi kelihatan apa namanya dukungan produk domestik bruto sektor kehutanan data tahun 2021 masih data di triwulan III, tapi kelihatan meningkat dari tahun ke tahun. Demikian juga ekspor hasil hutan dari Januari 2020 ke 2021 kelihatan membaik dan juga ekspor kayu olahan, kita lihat pada *screen* 20 makin baik, demikian pula produksi kayu. Dan hasil hutan bukan kayu pada halaman 24 ini juga makin meningkat baik dari, terutama khususnya dari perhutanan sosial.

Kemudian demikian pula dengan nilai ekonomi dari tumbuhan dan satwa liar, mohon periksa pada halaman 25, ini juga jenis-jenisnya juga mohon periksa pada halaman 26 seperti reptil, karang, amphibi, hewan lunak, mamalia, ikan, dan lain-lain. Dan sementara dari flora ataupun tumbuhan seperti anggrek, gaharu, pasak bumi, limbah, sonokeling, ramin dan lain-lain.

Dari sisi PNB sendiri, halaman 28, KLHK sebetulnya menyumbang cukup besar yaitu 5,87 triliun. Selama masa pandemi juga kawasan konservasi kita kontrol terus, Pimpinan dan Anggota yang kami hormati. Jadi setiap saat berdasarkan ritme dari situasi pandemi kita mengontrol taman-taman nasional dan kawasan wisata dan kawasan suaka alam untuk taman wisata alam itu juga kita kontrol dan kelihatan *multiplier effect*-nya juga pada halaman 30.

Terkait dengan TORA tadi yang terhormat Pimpinan juga menyebutkan di dalam catatan pengantar, TORA sampai dengan saat ini telah mencapai areal 2,749 juta hektar dari target 4,1 juta. Sementara itu perhutanan sosial telah mencapai 1,1 juta KK dengan 8.136 kelompok dan luas pada halaman 33 sekitar 4,9 juta hektar dari target. Sebetulnya target 12,7 itu adalah target ideal. Target selama 2015 sampai 2019 itu kemarin 4,2 juta dan perkiraan saya

sampai 2024 itu harusnya kita bisa mencapai sampai 8 juta atau sedapat-dapatnya lebih dari itu.

Kemudian di halaman 35 realisasi anggaran 2021 untuk KLHK sebesar 96,25%. Pak Sekjen, ini belum masuk BRGM? Iya, 96,61 rata-rata KLHK, rata-rata nasional 96,2 belum termasuk BRGM.

Kemudian tadi yang terhormat Pimpinan menanyakan tentang *Automatic Adjustment* belanja KLHK bahwa ini sesuai dengan surat Menteri Keuangan maka 5% dari pagu itu dicadangkan. Kami memikirkan konfigurasi, Ketua, mohon izin, mohon periksa pada halaman 39, Ibu dan Bapak Anggota yang terhormat dan Pimpinan yang kami hormati, pada halaman 39. Saya tadi juga memikirkan hal yang saya, Pimpinan, bahwa *Automatic Adjustment* tadi yang terhormat Pimpinan mengatakan ini semacam Pencadangan, Bapak, ini kita akan ikuti perkembangannya sampai dengan Mei-Juni, nanti kita evaluasi kembali. Saya sangat menghormati catatan dan arahan dari Komisi IV bahwa kita akan nanti mengalokasikannya pada agenda-agenda yang terkait dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. Jadi Pencadangan ini telah diatur sedemikian rupa untuk tidak mengganggu target-target kinerja, Pimpinan. Jadi kita lihat dan diatur apa namanya pengalokasiannya.

Pimpinan dan Ibu/Bapak yang kami hormati,

Selanjutnya pada bagian rencana tahun 2022, seperti telah kami laporkan di waktu-waktu terdahulu sasaran utamanya meliputi menjaga pertumbuhan PDRB, PDB, kemudian menjaga ekspor peningkatan produksi hasil hutan dan neraca perdagangan non migas, meningkatkan kapasitas produksi kelompok tani dalam hutan untuk pemerataan ekonomi wilayah, dan mendorong ekonomi sirkular, serta mengurangi beban lingkungan.

Kalau lihat di alokasi anggarannya di halaman 42, mohon izin, kita mengalokasikan dari 7 prioritas nasional itu 4 menjadi beban atau mandat kepada KLHK yaitu:

- Prioritas nasional pertama menyangkut ketahanan ekonomi sebesar 436 miliar;
- Prioritas nasional kedua pengembangan wilayah mengurangi kesenjangan; dan
- Peningkatan SDM berkualitas berdaya saing; serta
- Prioritas nasional yang keenam membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Angka ini kira-kira nilainya 46% dari dukungan KLHK itu untuk agenda prioritas nasional atau pembangunan nasional.

Kemudian 5 programnya seperti kami laporkan di waktu-waktu yang lalu yaitu:

- Program kualitas lingkungan hidup;
- Pengelolaan hutan berkelanjutan;
- Pendidikan dan pelatihan vokasi;

- Ketahanan bencana perubahan iklim; dan
- Dukungan manajemen.

Kemudian mohon periksa pada halaman 44, dukungan manajemen itu mengalokasikan belanja 3,37 triliun, ini kira-kira 47%, Pimpinan dan Ibu/Bapak Anggota yang kami hormati, untuk keperluan belanja personil, kemudian gaji, operasi kantor, pemeliharaan, dan lain-lain, dan program pengelolaan hutan 2,68 triliun, lalu kualitas lingkungan, ketahanan bencana dan iklim, dan sebagainya. Dengan demikian sebetulnya 47% alokasi dana kita untuk manajemen dan 53% untuk program dan 46% dari belanja program itu untuk mendukung prioritas nasional.

Dukungan berbasis masyarakat kami laporkan pada *screen* 45, 645 miliar, ini kira-kira 20% dari belanja-belanja pembangunan yang bukan belanja operasi personil dan kantor. Jadi kalau nanti *Automatic Adjustment*, ini angkanya angka 645 ini kira-kira 20%, kalau nanti *Automatic Adjustment* sebesar 281 miliar bisa masuk maka akan menjadi kira-kira 900 miliar dan berarti bisa meng-cover sampai dengan 28-29%. Jadi komposisi untuk berbasis masyarakat itu yaitu program-program yang terkait dengan:

- UMKM SVLK;
- Kebun bibit rakyat dan bibit produktif;
- Kemitraan konservasi;
- Pembinaan kelompok tani hutan; dan
- Bang Pesona;
- Sekat kanal sumur bor;
- Akses lahan terbuka; dan
- Pengelolaan sampah dan limbah B3.

Sebaran per Direktorat Jenderal dan per Provinsi, mohon periksa pada halaman 47, 48, 47 untuk hutan lestari (PHL), halaman 48 untuk Dirjen DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan, dan konservasi pada halaman 49, serta penyuluhan dan hutan sosial di halaman 51, dan persampahan dan limbah di halaman 53, serta akses lahan terbuka dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, serta rencana-rencana bimbingan teknik, sosialisasi, dan lain-lain.

Pimpinan dan Anggota yang kami hormati,

Selanjutnya sehubungan dengan SK.01/MENLHK Tahun 2022, mohon periksa pada halaman 57, bahwa ini merupakan hasil Rapat Internal Kabinet arahan yang terhormat Bapak Presiden pada tanggal 15 November bahwa perizinan harus menjadi instrumen pengawasan dan harus dilakukan penertiban sampai pencabutan. Izin-izin dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, diterlantarkan, terindikasi pengalihan dari tujuan awal dan diantaranya juga masih ada yang dalam bentuk kawasan hutan yang utuh. Jadi alokasi lahan hutan harus efektif untuk produktivitas masyarakat dan harus memberi peluang kesempatan kerja yang lebih luas dan lebih baik dengan tetap menjaga kelestarian.

Bagaimana prosesnya, mohon periksa halaman 58, mulai dari arahan, kemudian ada tim kerja, kemudian kami melakukan evaluasi dan juga dengan telah keluarnya SK.01 juga terdapat mekanisme untuk klarifikasi. Jadi kita punya indikasi, itu yang indikasi berdasarkan foto satelit dan juga sudah ada yang dengan peringatan dan sebagainya. Nanti dari hasil klarifikasi di dalam *desk* verifikasi klarifikasi maka akan keluar SK definitif pencabutan atau pengembangan kebijakan peningkatan produktivitas dan perlindungan. Karena seperti yang terhormat Pimpinan katakan tadi bahwa posisinya harus sebagai posisi simpul negosiasi dari segala kepentingan. Jadi tidak bermaksud untuk menyusahkan perusahaan, tapi juga tidak boleh menyusahkan kepentingan dari masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan *desk* klarifikasi.

Jadi datanya mohon periksa pada halaman 60 bahwa izin-izin yang kita evaluasi itu menyangkut IPPKH, Pimpinan, kemudian HPH, kemudian HTI, lalu juga izin apa namanya sarana wisata alam.

Demikian, Pimpinan, langkah tindaklanjutnya mohon periksa pada halaman 62 tadi yang sebagaimana kami telah laporkan.

Terima kasih.

Selanjutnya kami akan mencatat dengan baik dan memperhatikan untuk langkah-langkah selanjutnya bagi keperluan kerja Kementerian.

Terima kasih, kurang lebih mohon maaf.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Shallom,
Om Shanti shanti shanti om.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Jadi tadi kita sudah mendengarkan penjelasan 2021-2022. Ini saya dapat info banyak sekali wisata alam yang tidak dijalankan dan mohon maaf kebanyakan sebagian milik oknum, oknum mantan pejabat. Oknum ya, saya tidak katakan pejabat oknum. Itu yang pertama.

Yang kedua, alangkah kecilnya satu wilayah Taman Nasional, misalnya kemarin saya melihat penangkaran Elang Jawa di Gunung Salak dengan luasan 78.000 hektar, kalau *enggak* salah dananya 14 miliar, yang bekerjanya *enggak* lebih dari 80 orang. Apa ini yang mau dijaga? Saya sangat prihatin sekali. Harusnya *kan* ini dijaga dengan baik, dikasih anggaran lebih, iya *toh*. Dan saya juga bingung, setahu saya *kan* di Kehutanan itu ada dana reboisasi, ada IAH dan lain-lain, ini ke mana? Paling *enggak kan* PNBP yang dihasilkan bisa *bargaining* ke Kementerian Keuangan, Bappenas maupun Dirjen Anggaran. Ini *loh* yang kadang-kadang saya sayangkan ini.

Kemudian lagi, Eselon II, Kepala Taman-Kepala Taman itu *kan* banyak yang kosong Kepala Balai-Kepala Balai. Kenapa *sih, kok* sepertinya tidak ada perencanaan yang jelas. Contohnya nanti bulan 7 ada pejabat Eselon I yang mau pensiun, seharusnya *kan* bulan 3, bulan 4 sudah ada *Fit and Proper Test* atau lain-lain yang sudah disiapkan, tidak perlu ada Plt-Plt lagi, ini *loh*. Seperti kemarin saya menegur Menteri Pertanian di sini, sampai sekarang namanya Irjen itu masih Plt, sudah 2 tahun. Saya tanyakan, "Mengerti *enggak*, Sekjen, anda Sekjen sebagai peraturan dan Undang-Undang ASN, berapa bulan bolehnya? Berapa tahun?" Ini *kan enggak fair*, yang diperiksa dan yang memeriksa orangnya sama. Ini *loh* yang saya tidak inginkan. Masa' di Kementerian tidak ada *database* yang *oh* si A mau pensiun bulan sekian, ini sekian, ini sekian, *kan* harusnya ada data yang jelas dan konkret.

Terima kasih atas penjelasannya.

Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Pak Budi, lanjutkan.

INTERUPSI F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Budi, saya interupsi dulu. Pimpinan, mohon izin interupsi, sedikit *aja* penegasan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan, Pak Ansi.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih, Pak Budi.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Yang terhormat Ibu Menteri, Pak Wakil Menteri, Pak Sekjen, dan jajarannya,

Tadi dari meja Pimpinan kita sudah sepakat kita berikan kesempatan kepada Bu Menteri untuk menjelaskan dan mendengarkan. Saya hanya mau bicara penegasan sikap saya, Bu Menteri. Saya datang ke sini tadi sebenarnya *pingin* mengomentari tentang 3,2 juta hektar itu. Tapi karena datanya tidak ada maka saya tidak bisa menanggapi.

Yang kedua, Pimpinan, tolong catat kata-kata Bu Menteri data indikatif 3,2 juta ini, data indikatif ini Bu Menteri mau katakan bahwa ini hanya perkiraan, ini data bohong-bohongan, ini data tidak nyata, tidak valid, tidak akurat. Ini bahasa eufemisme, ini bahasa permainan kata, ini bahasa perhalus. Saya ingin katakan bahwa 3,2 juta hektar itu bukan angka yang kecil, itu angka masa depan Republik Indonesia ini. Di sisi lain hari ini Presiden giat bicara soal *green economy*, bicara soal keberlanjutan. Terus terang kalau tidak transparan Ibu, bagaimana mau akuntabel, Bu? Dasar kebijakan kita tetap data yang valid dan akurat. Kalau begini kondisinya Ibu katakan bahwa hanya sekedar data indikatif yang nanti ujungnya bahwa 3,2 itu omong kosong, mohon maaf, ini pemerintah

tidak bisa kita andalkan sebagai penjaga konservasi. Saya *kok* melihat ini bukan sekedar alasan teknis administratif keterlambatan. Jangan sampai nanti saya mengganti Kementerian ini namanya Kementerian Keterlanjuran.

Terus terang, Pimpinan, saya kecewa. Jangan sampai nanti minggu depan Ibu datang dengan data terus yang terjadi adalah dibidang ini data indikatif, padahal di lapangan ada *kok*.

Terima kasih.

Itu saja yang mau saya tegaskan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Baik.

Terima kasih, Pak Ansi.

Kami catat juga dari meja Pimpinan. Saya dari tadi seluruh masukan dari teman-teman dan suara-suara yang sudah banyak menjelaskan kita semua permasalahan ini. Saya minta kita sekarang ya, Bapak/Ibu sekalian, silakan perwakilan dari fraksi untuk menyampaikan masukan-masukannya, catatan-catatan mengenai apa yang telah disampaikan dari Bu Menteri.

Dan kalau bisa kita tetap di sini, kita untuk sementara tidak bicara lagi, tadi sudah banyak yang menyuarakan masalah data 3,2 juta hektar dan telah disepakati. Dan Minggu depan kita akan mencari hari dan mengadakan Rapat Kerja lagi.

Saya persilakan pertama dari Fraksi Partai Gerindra, Pak Azikin Solthan.

F-P.GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Terima kasih, Ketua.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shallom,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam Indonesia Raya.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajarannya,

Mewakili Fraksi Partai Gerindra izinkan kami menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran KLHK tahun 2021 adalah sebesar 96,61% dari anggaran sebesar 7,67 triliun yang mana nilainya lebih besar dari rata-rata nasional sebesar 96,25%. Tapi realisasi ini masih lebih kecil dari komitmen yang disampaikan oleh Kementerian LHK kepada Komisi IV untuk melakukan optimalisasi penyerapan anggaran tahun 2021 sebesar 97,42%. Ini menjadi salah satu kesimpulan RDP Eselon I Kementerian LHK tanggal 29 November 2021. Kami meminta penjelasan atas kendala yang dihadapi.
2. Walaupun produk domestik bruto sektor kehutanan tahun 2021 turun dari tahun sebelumnya karena pandemi, namun selama tahun 2021 nilai ekspor kayu olahan mengalami kenaikan cukup besar yaitu sebesar USD3,6 miliar dimana produk *woodchips*, *veneer* dan *panel* menjadi jenis dengan peningkatan produksi tertinggi. Kami dari Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan berapa banyak pengusaha industri kayu dan UMKM yang terlibat dalam kenaikan ekspor tersebut.
3. LHK telah melaksanakan komitmennya yaitu dengan memindahkan Kantor Balai Taman Nasional Gunung Leuser yang ditandai dengan peresmiannya oleh Pimpinan Komisi IV, Pimpinan KLHK beserta pemerintah Aceh di Banda Aceh pada tanggal 16 Februari 2021. Tetapi dalam pelaksanaannya secara administrasi dan eksekusi program sampai sekarang belum maksimal dilakukan. Kami meminta kepada Menteri LHK untuk menjelaskan kendala yang dihadapi, sehingga tidak dapat segera dioperasionalkan secara maksimal. Artinya, Bu, secara *de jure* sudah diserahkan, tapi secara *de facto* kegiatan-kegiatan di situ belum optimal.
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencabut izin 192 unit konsesi pemanfaatan hutan seluas 3.126.439,36 hektar. Selain itu pada periode September 2015 sampai Juni 2021 KLHK juga telah mencabut izin 42 unit konsesi pemanfaatan hutan seluas 812.796,53 hektar. Terkait dengan itu kami dari Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan:
 - a. Apakah pencabutan izin ini menindaklanjuti putusan-putusan yang sudah inkrah? Jika belum, bagaimana tindak lanjutnya?
 - b. Bagaimana pengawasan pengamanan kawasan hutan setelah pencabutan izin tersebut, termasuk alokasi anggaran di tahun 2022, mengingat pencabutan izin dapat menyebabkan *open access*, dapat menyebabkan terjadinya *Illegal Logging*, penambahan dan pendudukan kawasan hutan, dan kebakaran hutan serta lahan.
5. Selanjutnya kami meminta agar Badan Restorasi Gambut dan Mangrove harus fokus pada pengelolaan ekosistem gambut yang berada di luar konsesi perusahaan yang telah dimoratorium.
6. Mengingat masih banyak kegiatan dan program LHK di daerah, termasuk konservasi dan perlindungan mangrove yang belum mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat sekitar hutan, kami meminta kepada Menteri LHK agar melaksanakan sosialisasi dalam bentuk bimbingan teknis bersama Komisi IV diperbanyak pada semua level Eselon I.

7. Penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai terlihat. Meskipun begitu masih banyak kasus lingkungan yang belum tersentuh. Kami meminta kepada KLHK untuk melaksanakan keadilan restoratif terhadap kerusakan lingkungan atau kehutanan yang terjadi. Kami meminta penjelasan bagaimana peran Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasan internal terhadap program-program seperti terjadinya deforestasi yang masif, kasus-kasus *Illegal Logging* dan lainnya.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Selanjutnya juga kami sampaikan bahwa di Dapil kami, kami telah sampaikan ada pengambilan getah pinus. Getah pinus itu, Bu, kalau diambil, Ibu Menteri, lantas tidak diperbaiki betul dia, dirapikan dia punya sisa, maka pada saat musim kemarau begitu ada puntung rokok hutan itu terbakar. Dan setelah kami ke lokasi, kami telah memberikan tadi fotonya ke lokasi, tidak ada yang bertanggung jawab, kecuali katanya polisi hutan yang sering datang ke sana. Ini dampaknya sangat fatal bagi masyarakat, karena kebakaran itu bukan saja membakar hutan, tapi tanaman kopi masyarakat dan rumah masyarakat yang ada di sekitarnya ikut terbakar dan inilah yang mengakibatkan banjir setiap saat di daerah Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Gowa hampir setiap tahun, karena hutan sudah gundul, terbakar. Ini kami minta ada perhatian khusus, karena ini adalah aspirasi masyarakat yang kami harus perjuangkan di forum ini.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Sekian.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih, Pak Azikin.

Berikut Pak Suhardi Duka dari Fraksi Partai Demokrat, kami persilakan.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Yang saya hormati Pimpinan,
Anggota Dewan yang terhormat,
Yang saya hormati Ibu Menteri bersama dengan Wakil Menteri, Sekjen, dan para Eselon I,

Saya mengapresiasi bahwa kontribusi PNB 5,8 triliun dan tentunya kita berharap bahwa target 2022 akan lebih besar lagi. Begitu juga dengan IPPKH yang begitu besar kawasan hutan yang dikelola, tapi negara masih menerima kecil. Ini yang saya berharap pada Ibu Menteri.

Begitu juga dengan posisi sawit rakyat yang masih berada di kawasan hutan, saya minta supaya ini ada kepastian hukumnya. Kalau memangnya mau diberikan ya diberikan, kalau tidak diberikan ya tidak diberikan, supaya mereka bisa melakukan *replanting* kalau memangnya sudah keluar dari kawasan hutan. Tapi menurut saya kalau rakyat punya saya kira baik hatilah kita memberikan kepastian hukum kepada mereka.

Ekspor kayu naik, begitu juga tumbuhan dan satwa cukup naik menggembirakan. Ya, hanya saja memang ini saya melihat pasti berkaitan dengan lingkungan, di lain sisi data yang disajikan terjadi penurunan deforestasi. Tapi produk kayu naik saya kira ada kontra produktif.

Oleh negara Eropa, Jepang, dan beberapa negara yang lain sertifikat legalitas kayu kita SVLK ya, itu belum diterima ya, belum diterima. Akibatnya harga kayu menjadi murah dan tidak bersaing, karena selain SVLK juga Indonesia masih diberi syarat yang banyak seperti FSC dan lain-lain sebagainya. Artinya SVLK dari Kehutanan itu dianggap bodong atau tidak diterima oleh mereka. Bagaimana sikap dan diplomasi Kementerian Kehutanan untuk menyikapi ini? Saya kira ini perlu disikapi supaya, masa' harga kayu, kayu-kayu kita lebih bagus dibandingkan dengan Malaysia atau negara Filipina, tapi harga kayu kita lebih rendah. Ini harga diri negara juga ini.

Selanjutnya terhadap kebijakan Kementerian Kehutanan mencabut izin beberapa HPH dan lain sebagainya termasuk di Sulawesi Barat saya *support*. Cabut semua, Bu, kalau melanggar. Hanya saja jangan pilih kasih, itu saja, jangan pilih kasih. Kalau semuanya melanggar, melanggar siapa saja, biar Anggota Komisi IV punya cabut juga. Ya kalau ada dan saya kira tidak ada.

Untuk itu saya berharap kepada Ibu Menteri, saya kira cukuplah kita memberikan izin HPH itu, cukuplah kita memberikan izin perkebunan dengan puluhan ribu apa namanya, puluhan ribu hektar. Stop izin-izin seperti itu. Kasihlah izin yang 1.000 hektar, 2.000 hektar, maksimal 3.000 hektar, karena kalau pengusahanya ingin bangun PKS pasti dia bermitra dengan masyarakat, dia tidak bisa hidup sendiri itu pengusahanya kalau hanya dikasih 1.000 hektar atau 2.000 hektar. Dia mau bangun PKS tidak bisa, karena tidak cukup sawitnya bisa masuk kalau hanya dengan 1.000 hektar atau 2.000 hektar. Di sinilah letaknya, langsung 10.000 hektar? *Waduh*, konglomerat yang menguasai semua sumber daya alam kita. Apa namanya, harga minyak saja susah diturunkan karena bukan BUMN yang menguasai CPO, yang menguasai CPO adalah swasta dan konglomerasi, akibatnya ya kita tidak bisa mengontrol harga. Hanya sekedar harga minyak goreng saja tidak mampu kita kontrol. Akibatnya uangnya petani kita gunakan untuk mensubsidi.

Selanjutnya, Ibu janjikan untuk biaya produktif di Dapil mulai 2021 sampai dengan 2022 ini. Syukur karena 2022 ini saya lihat daftarnya kita dapat 20.000 batangnya ya. 20.000 batang ini, *eh* berapa, 20.000 batang ya? Ini kecil sekali, hanya satu kelompok saja yang bisa menerima ini, Bu, kalau 20.000 batang ini. 1.000 batang per orang ya hanya 1 hektar saja, sedangkan masyarakat butuh banyak ini. Jadi janjinya Ibu ini sampai dengan 2022 belum terpenuhi.

Tadi Ibu mengatakan bahwa *Automatic Adjustment*. Semoga saja kondisi ekonomi bangsa kita 2022 ini baik, dengan demikian *Automatic Adjustment* ini bisa kembali kepada KLHK, tidak ditarik. Dan Ibu berjanji bahwa kita akan kembalikan ke masyarakat, termasuk biaya produktif dan lain-lain yang menjadi prioritas masyarakat kita. Saya catat janjinya Ibu lagi ini ya supaya jangan berlangsung sampai 3 tahun, cukup 2 tahun saja.

Saya terima kasih kepada Ibu dan Ibu Fifin ya. Kalau saya kritik beberapa tahun yang lalu, kali ini saya terima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah membangun insinerator apa namanya itu, inisiator apa itu?

INTERUPSI:

Insenerator.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Insinerator di Sulawesi Barat. Apakah sudah, bukan bakar sampah, bakar B3, Pak, B3 rumah sakit utamanya. Apakah nantinya sudah berfungsi dengan baik, saya akan coba tinjau kalau saya reses ini. Waktu diresmikan saya tidak tahu apakah sudah diresmikan, saya tidak dipanggil.

Demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

*Wallaahul Muwafiq Illa Aqwamith Thoriq,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih, Pak Suhardi Duka.

Selanjutnya Pak Sutrisno.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Izin senior, Pak Made Urip, saya mewakili Poksi PDI Perjuangan.

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian.*

Pimpinan, Rekan-rekan Anggota dan Ibu Menteri beserta jajaran,

Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ibu Menteri, hari ini adalah Rapat Kerja evaluasi kinerja 2021 dan mensikapi rencana kerja tahun 2022.

Prinsip yang akan kami sampaikan berapapun anggaran yang dipakai *toh* akhirnya bagaimana manfaatnya buat rakyat.

Kemudian yang mendasari apa yang akan disampaikan, saya akan menggunakan motto atau slogan komunitas kehutanan: *Tiada hutan tiada air, tiada air tiada kehidupan*. Oleh karena itu, yang pertama dan utama yang saya sampaikan adalah berapapun dan bagaimanapun programnya kami tentunya bagaimana manfaatnya buat rakyat yang akan menjamin kehidupan rakyat ke depan bagaimana kondisi lingkungan hidup kita.

Saya memulai bicara dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. 2021 KLHK berhasil meningkatkan rankingnya ya dari apa namanya naik menjadi 1,41 poin menjadi 71,41 poin Indeks Kualitas Lingkungan Hidup kita. Hanya masalahnya yang tertinggal adalah masalah yang berhubungan dengan kehidupan rakyat, kehidupan masa depan kita yaitu Indeks Kualitas Air, ini masih sangat rendah, target saja tidak tercapai. Dari 55,2 ditargetkan hanya realisasi 53,33. Indeks Kualitas Udara dari target 87,23 hanya 84,20. Indeks Kualitas Tutupan Lahan dari 62,9 hanya 60,23. Semuanya ini, ini bersumber dari masalah pengelolaan hutan. Indikator-indikator bagi kehidupan masa depan sangat memprihatinkan, karena kondisi hutan kita juga tentunya perlu mendapatkan perhatian.

Pertanyaannya adalah rencana kerja 2022 dengan indikasi yang tadi saya sampaikan, bagaimana menanggulangi ya yang harus tercermin dari Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022 ini. Karena orientasi pemerintah hadir untuk rakyat agar rakyat hidupnya sejahtera. Bagaimana mungkin manakala kondisi lingkungannya sangat terganggu.

Yang kedua, saya mensikapi Indeks Kinerja Perubahan Iklim ya. Prestasinya di 2021 ini mampu meningkatkan peringkat dari peringkat 39 menjadi peringkat 15 dari 61 negara di dunia. Indikator yang kuat mempengaruhi adalah emisi gas rumah kaca dengan bobot 40%. Kembali lagi ya, yang akan mampu mengurangi rumah kaca yang terbangun adalah kondisi kelestarian hutan. Dengan adanya kebijakan pemerintah ya, dengan kebijakan TORA, kebijakan perhutanan sosial, kebijakan deforestasi, bila tidak dikontrol dengan baik ini dampaknya akan memperkuat emisi gas rumah kaca kita. Oleh karena itu, di lapangan dengan kebijakan TORA memang memberikan ruang bagi rakyat, mendapatkan kejelasan dalam memanfaatkan hutan yang telah diserahkan kepada rakyat, begitupun juga dengan adanya TORA. Tapi di lapangan dengan adanya kewenangan itu atau hak itu justru hutan-hutan yang ada dibabat habis.

Oleh karena itu, hutan-hutan yang ada tentunya dengan kebijakan-kebijakan itu kami minta untuk tetap dijaga dan dilestarikan. Tapi ini kenapa itu terjadi? Permasalahan mendasar adalah lemahnya koordinasi. Kami lapor sama pemerintah daerah juga tidak ditindaklanjuti karena kewenangan kehutanan sudah ditarik ke Provinsi, lapor juga kepada Perhutani itu sudah dijadikan TORA, lapor kepada Kepolisian pun juga tidak ada tindaklanjut karena sudah apa namanya undang-undang memberikan hak kepada rakyat untuk mengelolanya. Oleh karena itu, saran yang disampaikan, kebijakan-

kebijakan apapun tentunya koordinasi diantara pemangku kepentingan harus berjalan dengan baik.

Kemudian Deforestasi ya, dalam kita membangun meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, kita tidak bisa menghindari, tapi bagaimana lingkungan bisa tentunya di kedepankan. Di lapangan, Bu Menteri, kewenangan lingkungan hidup sudah diserahkan kepada pemerintah daerah otonom ya. Pemerintah daerah otonom juga kurang memiliki kemampuan bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana memberikan izin kepada apa namanya investasi, semuanya hanya mengedepankan administrasi, tapi bagaimana ruang itu terjaga lingkungannya ini masih terabaikan. Mohon Kementerian pun juga memberikan petunjuk yang jelas, apa namanya, SOP yang jelas agar daerah otonom pun juga untuk menjalankan membantu Kementerian untuk bisa menjaga lingkungannya.

Yang ketiga, pengolahan sampah dan limbah B3. Bu Menteri, sebagaimana tadi disampaikan kewenangan pengelolaan sampah limbah B3 sepenuhnya menurut Undang-Undang Otonomi Daerah ada di pemerintah daerah otonom. Tapi kembali, kita ini NKRI, tentunya pemerintah pusat tidak bisa melepaskan begitu saja. Pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan untuk mengolah sampah. Sampah berserakan di mana-mana. Ini manakala tidak ditanggulangi seperti satu pencerminan bahwa negara kita memang masih tertinggal belum ada kemajuan. Solusi yang kami cermati di anggaran 2022 ya Kementerian saja baru mampu *ngasih* 5 traktor roda 3 untuk membantu daerah menarik apa namanya sampah-sampah yang berserakan.

Bu Menteri, manakala koordinasi antara pusat dengan pemerintah daerah otonom tidak jalan, sampai kapanpun akan sulit penanggulangan sampah dan limbah B3 ditanggulangi. Bagaimana Kementerian bisa mengintegrasikan penganggaran antara pusat dan daerah agar bisa maksimal daerah itu juga menangani permasalahan sampah dan limbah B3. Khusus untuk limbah B3, sebagaimana pernah disampaikan pada saat bertemu sama Bu Menteri para Kepala Daerah, mohon untuk dipermudah perizinannya, jangan akhirnya untuk penanganan limbah B3 ini menjadi monopoli kelompok-kelompok tertentu. Berikan kesempatan daerah menjadi sumber pendapatan asli daerah, daerah bisa mengelola sendiri.

Kemudian yang berikutnya keempat. Mohon maaf saya Pancasila, Pak, 5 masih harus bertanya. Bu, izin ya, masih 2 lagi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Terakhir?

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

2 lagi, Bu, tapi sebentar ini, tidak panjang.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

2 lagi?

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Iya.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Terus satunya a, b, c apa *enggak*?

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Enggak, langsung aja.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Silakan.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Iya.

Sasaran utama KLHK 2022 dari 1 sampai 4 ya itu *kan* peningkatan PDB, semuanya berkait pada masalah peningkatan ekonomi. Memang itulah arah kebijakan pemerintah 2022, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesehatan. Realisasinya direncanakan 436,18 miliar dari daftar yang tadi dipersoalkan, sehingga juga rapat kita juga berlama-lama yang susah dibaca, saya mencoba menjumlahkan ini hanya 180,85 miliar realisasinya di luar apa namanya restorasi gambut. Di dalam itu juga bukan aspirasi Anggota Dewan semuanya, aspirasi Anggota Dewan hanya ada 5 poin saja.

Oleh karena itu, ini mohon dikaji kembali ini. Kami ini membantu Kementerian, mengontrol program-program yang sungguh-sungguh ini bisa menyentuh kehidupan rakyat, mengontrol agar memang ada manfaatnya bagi perbaikan kehidupan rakyat. Ini akar persoalan sesungguhnya diantaranya tadi apa namanya awal rapat kita, ini mohon dikaji kembali.

Terakhir permasalahan daerah. Pemerintah, Presiden sudah memberi kebijakan untuk menertibkan penggunaan lahan yang terlantar. Di era otonomi daerah peran pemerintah sudah berubah ini, Bu, yang tadinya menggerakkan, mendorong. Selama rakyat daerah bisa menjalankan tentunya berikan kesempatan kepada daerah. Ada persoalan tanah desa dengan Perhutani ya, jelas-jelas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi pun juga mendukung, mohon untuk diselesaikan, jangan dipersulit. Sebut saja itu yang terjadi di apa namanya Kabupaten Sumedang, di Desa Babakan Asem di Kecamatan Conggeang, di Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya, mohon untuk diselesaikan, karena sebagian sesungguhnya register juga sudah dijalankan, hanya tinggal sebagian kecil belum dijalankan.

Saya kira itu, Bu, 5 Pancasila.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Wa'alaikumsalam.

Setiap tanggapan Pak Sutrisno mesti 5 ya?

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Iya.

INTERUPSI F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):

Mohon izin, Bu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Nanti di dalam pendalaman *aja*, Pak Made Urip.

F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):

Melanjutkan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Iya, tapi nanti di pendalaman *aja*.

Terima kasih.

Selanjutnya, ini kenapa Golkar jejer-jejer di situ semua? Konsolidasi apa? Baik, tumben, tumben. *Eenggak* ada *distancing* lagi, *eenggak* boleh.

Silakan, Pak Abdullah Tuasikal.

F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih.

Yang saya hormati Pimpinan, Anggota DPR Komisi IV,
Yang saya hormati Ibu Menteri, Pak Sekjen, beserta jajarannya,

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Hari ini saya akan membacakan pikiran dari teman-teman Anggota Fraksi Nasdem pada Rapat Kerja Komisi IV dengan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Saya langsung aja.

Melalui Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan hari ini, kami Fraksi Partai Nasdem menyampaikan beberapa masukan dan pandangan sebagai berikut:

Pertama, kami mengapresiasi kinerja KLHK dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik. Penurunan laju deforestasi dan kebakaran hutan, peningkatan produktivitas hutan, dan indeks kinerja perubahan iklim Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2021. Kami, Fraksi Partai Nasdem akan terus mendukung dan berharap prestasi ini bisa terus ditingkatkan pada tahun 2022 untuk memberikan efek pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia juga kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kami, Fraksi Partai Nasdem melihat sesuatu yang sangat positif dalam pengelolaan sampah yang dilakukan KLHK dengan jumlah bank sampah yang mencapai 11.552 unit pada tahun 2021 dan 4,31 juta ton sampah yang dikelola juga menumbuhkan *start up* berbentuk NVRO pengelolaan sampah, namun faktanya kita masih menyaksikan sampah menumpuk di mana-mana, di jalan, di pekarangan, di lahan kosong, di kebun-kebun, dan sebagainya. Ada sekitar 60 juta lebih sampah yang dihasilkan setiap tahunnya di Indonesia, angka ini jauh dari 4,3 juta ton yang terkelola. Persoalannya sebenarnya pada sistem pemilihan sampah yang tidak berjalan melibatkan swasta sebagai pabrik *Waste Collector* seperti di Singapura, tidak ada pusat daur ulang sampah di tempat pembuangan akhir seperti Ecopark di Hongkong dan upaya daur ulang sampah lebih dari 95% seperti yang dilakukan oleh Norwegia, Swedia, dan negara-negara maju lainnya. Pertanyaannya apakah kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Sebenarnya sangat bisa, tinggal *political will* dari pemerintah untuk memerangi sampah atau menjadikan sampah sebagai *recycle diamond* untuk dikelola menjadi bahan baku industri atau sumber energi yang lebih besar. Kami menunggu andil besar dari KLHK untuk menjadi lokomotif, kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sampah ini.

Dalam pengembangan NVRO, kami meminta KLHK menggandeng anak-anak muda untuk terlibat aktif sebagai pelaku usaha di bidang pengolahan sampah, sekaligus menjadikan mereka sebagai generasi yang sadar akan lingkungan. KLHK harus memiliki skema yang tepat untuk menarik partisipasi aktif generasi milenial dan generasi Z yang jumlahnya sekitar 145,39 juta orang dengan segala kemampuannya dalam mengadopsi teknologi modern dan *Artificial Intelligence* bagi kemajuan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup, kami belum melihat visi ini di KLHK.

Terkait dengan kinerja ekspor hasil hutan kami terus mendukung upaya KLHK untuk terus konsisten meningkatkan ekspor kayu, kayu olahan, kayu bulat, dan produksi hasil hutan bukan kayu. Capaian eskalasi ekspor ini harus memberikan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya

masyarakat di kawasan sektor hutan, tidak hanya menggantungkan pihak-pihak tertentu dan korporasi yang terlibat di dalam saja.

Berkaitan dengan program pengembangan perhutanan sosial nusantara atau Bang Pesona yang sudah berjalan, kami ingin mendengar laporan pelaksanaannya di lapangan dari KLHK. Sejauh ini kami melihat program ini sangat bagus untuk terus dilanjutkan pada tahun 2022, hanya butuh ekspansi kepada kelompok masyarakat sektor hutan yang belum mendapatkan bantuan dari terobosan untuk sekiranya bisa melibatkan anak-anak muda sebagai pengelola perhutanan sosial supaya generasi muda terlibat aktif merawat hutan dan memiliki orientasi berwirausaha dengan potensi sumber daya alam yang ada di sekitarnya.

Mengenai SK Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengendalian Perizinan Konsesi Kawasan Hutan, kami ingin memastikan bahwa agenda ini benar-benar dijalankan dengan baik tanpa ada potensi-potensi yang merugikan masyarakat dan celah tindakan koruptif atau asal ganti pemain lama dengan pemain baru. Tanpa perubahan substansial, pencabutan dan pemberian izin konsesi kawasan hutan ini akan menjadi *concern*. Kami ke depan sebagai bagian dari kerja pengawasan DPR RI untuk meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan atau langkah yang diambil pemerintah benar-benar untuk kepentingan mensejahterakan masyarakat dan dilaksanakan melalui prosedur yang benar dengan prinsip *good and client governance*.

Kami mengapresiasi kinerja dan realisasi Anggota, maaf, kami mengapresiasi kinerja dan realisasi anggaran BRGM tahun 2021 yang memuaskan, hanya sedikit catatan pada tugas pembantuan yang hanya terealisasi 91,91%. Ke depan, kami meminta kepada BRGM untuk terus bekerja maksimal melakukan restorasi gambut dan rehabilitasi pemeliharaan mangrove di 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Percepatan rehabilitasi mangrove hanya di 32 Provinsi. Kami juga mendorong skema pendanaan kegiatan PRM melalui investasi. Kewajiban rehabilitasi DAS, CSR, dan dana hibah bisa terealisasi karena pekerjaan ini sudah seharusnya melibatkan banyak pihak, *Stakeholder* yang lebih membantu melestarikan mangrove dan menjaga lingkungan serta bersama-sama, tinggal kemudian dibuat aturan dari sistem yang baik juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ibu Menteri yang saya hormati,

Ini juga ada pikiran-pikiran, masukan dari teman-teman kita Dapil, saya akan menyerahkan dan akan masukkan sebagai lampiran. Saya kira demikian.

*Wabillaahit Taufiq Wal Hidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*
Salam sejahtera untuk kita sekalian.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik.

Terima kasih, Pak Abdullah Tuasikal.

Selanjutnya Pak Hanan.

F-PG (Ir. H. HANAN A. ROZAK, M.S.):

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.*

Pimpinan dan Anggota Komisi IV,
Ibu Menteri, Wakil Menteri, beserta jajaran Eselon I yang saya hormati,

Pertama saya sangat apa namanya berterima kasih dan memberikan apresiasi disajikan laporan ataupun bahan-bahan dari Ibu dengan angka-angka ya, Bu. Jadi ini sangat apa namanya memudahkan untuk memahami apa namanya kinerja yang dicapai oleh Kementerian Kehutanan.

Sesuai dengan undangan sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi hari ini terkait dengan evaluasi 2021, kemudian *Adjustment* 2022, kemudian program untuk 2022. Namun tadi sempat di awal rapat berkembang terkait dengan persoalan-persoalan lahan ya, lahan Kehutanan yang perlu mendapat perhatian.

Nah di sini di laporan Ibu ini kami disajikan ada 4 pilar, Bu. Ada pilar lingkungan, pilar sosial, pilar ekonomi, dan pilar tata kelola. Ya mungkin tadi yang sempat di awal rapat yang berkembang itu yang mungkin terkait dengan pilar tata kelola. *Nah* di DPR/MPR sebenarnya ada juga 4 pilar ya, kalau 4 pilar kami yang mensosialisasikan. *Nah* ini pilar ini itulah kepentingan kawan-kawan juga mensosialisasikan dalam betul Bimtek-bimtek ini kaitan 4 pilar ini.

Kemudian apapun anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk sektor kehutanan dan lingkungan hidup itu tentunya untuk meng-cover 4 pilar ini. *Nah*, di sini sudah disajikan kinerja pilar lingkungan misalnya saja yang cukup menarik ini menanjak dari tahun 2018 ini terus meroket ke atas ya. *Nah*, tentunya ini kontribusi, baik kontribusi atas dialokasikannya APBN untuk mendukung pilar lingkungan itu maupun dilakukan oleh pihak-pihak ketiga ya, masyarakat maupun dunia usaha. *Nah*, saya kira, Bu, perlu juga disajikan kinerja APBN kita, Bu, APBN kita misalnya saja terkait dengan indeks lingkungan hidup ini seperti apa. Misalnya tercapai 71,41 itu bagian APBN-nya yang seperti apa, pencapaian yang diperoleh melalui APBN-nya seperti apa ya, sehingga kita bisa melihat ya ke depannya seperti apa terkait dengan apa namanya perencanaan-perencanaan di APBN itu.

Kemudian, Ibu Menteri yang saya hormati, kalau urusan kehutanan ini dan lingkungan hidup secara sederhana mungkin perlu saya lihat secara sederhana kaitannya yang pertama terkait dengan deforestasi, kemudian terkait dengan konservasi fungsi hutan, kualitas lingkungan dan perizinan-perizinan, *nah* ini perlu mendapat perhatian secara khusus. Apapun kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan arahnya ke sana. Kita saat ini

masih berpegang kepada aturan yang ada, Undang-Undang 41 maupun Undang-Undang Konservasi dan Ekosistem, bahwa apa namanya kewenangan-kewenangan Kementerian Kehutanan maupun instansi bidang kehutanan di daerah itu sudah diatur dengan undang-undang itu ya.

Ibu Menteri yang saya hormati,

Perhatian terhadap pengamanan hutan atau perlindungan hutan ini saya minta ke depan harus mendapat perhatian secara khusus. Saya melihat ini belum mendapat perhatian yang baik. Karena apa? Hutan itu intinya kalau dijaga dengan baik ya dia akan bertahan, Bu. Justru ini kelonggaran-kelonggaran pembiaran-pembiaran yang mengakibatkan hutan itu rusak. Saat ini ya bukan di zamannya Bu Siti Nurbaya sebagai menteri, sudah ada keterlanjuran. Contohnya saja di kawasan-kawasan hutan produksi, hutan lindung, bahkan kawasan konservasi sudah banyak masyarakat masuk ke sana, sementara kegiatan-kegiatan pengamanan dan perlindungan ini saya lihat dari tahun ke tahun bukan ditingkatkan malah berkurang.

Untuk itu, Bu, perhatian ke depan khusus untuk yang dilindungi undang-undang, baik Undang-Undang 41 maupun Undang-Undang Konservasi, ini mendapat perhatian anggarannya, kegiatannya, program kegiatannya, terkait dengan pengamanan hutan. *Nah* contohnya saja misalnya saya pada saat reses yang lalu berkunjung ke Taman Nasional, Taman Nasional Way Kambas, saya coba menyederhanakan persoalan. Karena saya tidak mau berpikir terlalu rumit, saya menyederhanakan persoalan. Yang namanya gajah, kemudian harimau, hewan-hewan itu keluar dari kawasan karena ada persoalan hewan itu ya. Dia keluar bukan mau dagang, bukan mau sekolah, bukan mau apa, dia cari makan. Saya berpikir bahwa karena adanya kekurangan sumber pakan di dalam kawasan, itulah yang mengakibatkan pergeseran itu.

Sedangkan di lain pihak saya melihat, belum ada atau sangat sedikit kegiatan-kegiatan di sektor kehutanan di Kementerian Kehutanan yang memperhatikan terkait dengan sumber pakan ini. Misalnya saja untuk harimau ya mungkin kita perbanyak populasi babi di dalam kawasan itu, dia tidak cari makan di luar. Begitu juga gajah, tanaman-tanaman yang kita identifikasi sebagai sumber pakan gajah itu perlu kita kembangkan ke depan, selain ada kegiatan-kegiatan fisik lainnya membuat kanal dan sebagainya, itu saya kira pembatasan. Tapi intinya hewan-hewan itu tidak akan keluar, fauna itu tidak akan keluar dari kawasan kalau tidak ada persoalan terkait dengan pakan. Untuk itu program ke depan ini perlu mendapat perhatian juga.

Yang terakhir, Bu Menteri, terkait dengan penerbitan perizinan, termasuk perizinan-perizinan di hutan tanaman produksi, hutan produksi yang tidak mampu dikelola oleh pemegang izin, ini saya kira perlu dievaluasi ya, perlu dievaluasi. Kalau dia hanya mampunya sebagian kenapa tidak dikurangi atau yang sudah terlanjur ditambah oleh masyarakat perlu dipertimbangkan apakah itu yang dijadikan perhutanan sosial. Mereka saat ini di dalam kawasan itu ilegal. Contoh di 45, Bu, Ibu mungkin *udah* beberapa kali ke sana, hampir 80% saya kira saat ini kawasan register 45 sudah diduduki masyarakat. *Nah*, ini bukan persoalan mudah untuk menatanya kembali. Mumpung ada kebijakan

terkait dengan pengendalian perizinan kawasan konservasi, ini saya kira kawasan hutan ini perlu dipertimbangkan, termasuk wilayah-wilayah itu yang mendapat perhatian ataupun diperbaiki ke depannya.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih, Pak Hanan.
Selanjutnya Pak Edward Tannur.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Test, oh mantap.

Selamat siang.

Ibu Ketua, Pimpinan DPR Komisi IV beserta Anggota,
Ibu Menteri beserta jajarannya,

Kita mempersingkat saja supaya kita telinga jangan tuli. Jadi begini, kita *ngomong* tentang KLHK dan kehutanan ini yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman ada 4 pilar utama. Jadi kinerja dari kementerian ini ditentukan oleh 4 pilar ini yaitu pilar lingkungan hidup, ekonomi, dan 2 lainnya, saya tidak usah *ngomong* satu persatu lagi.

Jadi mengenai prestasi yang dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini ada yang positif, ada yang negatif. Jadi yang positif kita beri apresiasi, yang negatif tolong sekali untuk diperbaiki, karena RI ini sekarang lagi sulit, masa-masa sulit, sudah pandemi covid, Kementerian juga kinerjanya, penyerapan dana tidak selesai, kita *ngomong doang* bilang mau sekian persen sekian persen kenyataannya tidak sampai target. Ini penyebabnya kompleks, kita tidak bisa salahkan Kementerian juga.

Cuma begini, Ibu, kita kalau *ngomong* itu harus memiliki landasan atau memiliki alasan yang tepat. Misalnya orang yang sudah masuk ke hutan karena tidak diawasi secara ketat, melanggar aturan, jawabannya singkat, keterlanjuran. *Nah* ini yang, *aduh*, kita pikir kata keterlanjuran ini sangat memalukan ini, kita ada di mana waktu mereka masuk itu, *kan* harus sudah ditegur. Kalau melanggar aturan ya dipidanakan saja, *kok* terlalu *repot sih*. Ini urusan banyak orang, bukan urusan satu dua orang. Jadi kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat secara terus-menerus, artinya secara periodik dan secara berkesinambungan. Jangan karena masyarakat ini sifatnya hari ini diberitahu kalau dia lagi senang dia ikut, kalau besok dia sudah utang banyak dia masuk sembarang *aja*. Jadi ini yang, itulah yang saya bilang Bimtek ini sangat penting memberikan bimbingan dan pendampingan dan

pengawasan. Sebenarnya bahasa-bahasanya sederhana sekali, cuma ya kembali lagi, manusia ini bermacam-macam yang kita temui di lapangan. Jadi kalau kita omong tentang aturan, mekanisme kerja, kita pintar, tidak ada yang lebih pintar dari kita. Tapi realisasi pelaksanaan di lapangan biasanya pura-pura lupa atau memang tidak tahu atau memang bodoh sama sekali. Ini yang saya dari tadi awal sidang saya sudah pusing, kepala saya sudah pusing *ngomong* barang begini. Sudah dicantumkan dalam kesimpulan, tinggal mengikuti, menyelesaikan itu saja tidak ada niat yang baik. Ini kantor ini berapa luas kantor Kehutanan ini, *kok* antara Dirjen, antara Eselon I, dan Ibu Menteri dan Wakil Menteri *kok* tidak ada koordinasi yang baik. Saya rasa kita habis rapat ini pulang kita diskusi, tadi itu DPR *ngomong* apa, jadi jangan sampai nanti kita ditagih lagi, kita dianggap orang tidak paham. Saya sedih kalau terhadap Ibu Menteri, terhadap jajaran Kementerian ini yang orang-orang yang sudah pakar dan sudah menguasai, sebenarnya ini tidak perlu terjadi. Perbanyak untuk diskusi dan berkomunikasi.

Satu lagi mengenai anggaran. Tolonglah, walaupun dia ada *Adjustment*, otomatis kah, *Automatically* kah, tolong awal-awal anggaran ini segera digenjut. dana sudah ada, genjut saja, bila perlu dananya kurang minta lagi Menteri Keuangan, "Bu, ini dananya kurang, tolong kasih." Karena kita tidak bisa membiarkan masyarakat ini dalam ketidakpastian. Ini anggaran tinggal dikucurkan saja. Jadi saya yakin kalau seandainya ini dana yang di apa ditahan 5% ini kalau kita bulan Agustus atau bulan Juli sudah selesai anggaran reguler pasti dikucurkan secepatnya, *kan* bagus kita prestasi. Kalau bisa ya syukur kalau bisa 125% lebih bagus lagi. Jadi ini kesalahan atau kekeliruan atau kekurangan kita berulang tahun terus. Ini membuat kami juga DPR mau menganggarkan juga kami ragu-ragu ini, karena kemampuannya cuma *ngomong doang* tapi realisasinya 10 program hanya 3 program, yang lain setengah-setengah.

Mengenai pilar ekonomi, jadi Ibu Menteri, ditengah pembicaraan saya minta maaf sekali lagi, ini tidak ada tendensi apa-apa. Saya hanya mau NKRI ini maju, maju dan rakyat bisa sejahtera. Karena kita juga malu kita dipilih oleh rakyat tapi tidak bisa mensejahterakan rakyat. Jangan sampai rakyat bilang ini Anggota DPR-nya yang sejahtera rakyatnya susah. Jadi ini kita semua ini dibiayai oleh anggaran dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, ini kita harus pahami betul-betul ini.

Jadi saya kira untuk saya, untuk kami Fraksi PKB melihat semuanya ini programnya *udah* bagus, hanya pelaksanaannya tolong dipercepat. Misalnya hasil ekspor dari hasil hutan kayu, sebenarnya ekspornya meningkat, bagus, positif, misalnya pendapatan dari bukan pajak itu, penghasilan dari bukan pajak meningkat, tapi dananya yang dihasilkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagian kecil saja yang masuk kembali ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini perlu kita perjuangkan untuk menjaga hutan dan lingkungan hidup kita. Kalau kita hanya pasrah saja ya sampai kapanpun Kementerian ini tidak bisa berjalan secara sehat. Kalau kita mau supaya Kementerian ini diperhatikan ya itu seperti itu, kita harus bisa memberikan masukan dan solusi kepada Kementerian Keuangan.

Intinya program-program yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat itu betul-betul harus dijalankan secara baik, secara komitmen *lah*. Jangan *ngomongnya* rakyat tapi kerjanya untuk, ya pengusaha juga rakyat, tapi peruntukannya lebih lebih khusus itu. Kalau masyarakat secara luas perlu kita dahulukan kepentingan-kepentingan itu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Masih banyak?

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Saya persingkat saja, Bu, nanti baru dibagikan saja, karena kita *ngomong* bolak-balik bolak-balik sama dengan saja. Jadi biar kita kasih kertas baca sendiri. Jadi terima kasih banyak, Bu, mungkin sedikit lagi saya sampaikan, ini yang terakhir sudah.

Ke depannya program anggaran tahun 2022 itu harus menjaga pertumbuhan PDB-nya, harus betul-betul dijaga agar ada peningkatan, jangan sampai tahun ke tahun malah menurun. Menumbuhkan ekspor dan meningkatkan produktivitas hasil hutan terus bergerak meningkatkan kapasitas produksi kelompok tani hutan sebagai upaya membantu pemerataan ekonomi wilayah, mendorong ekonomi sirkular untuk pengelolaan sampah dan limbah dengan mengurangi beban lingkungan.

Saya kira hanya itu, Ibu Menteri, Teman-teman Komisi IV, yang bisa saya sampaikan dari dalam isi hati saya. Jadi bukan hanya *ngomong* di mulut, otak, telinga dengar, otak mengolah, hati menentukan, mulut berbicara yang jujur.

Terima kasih.

Selamat siang untuk kita semua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Dari lubuk paling dalam.

Bu Menteri, sebelum ke Pak Haerudin yang terakhir untuk fraksi. Untuk anggaran mangrove tidak ada *kan*? Dari Kementerian Keuangan belum ada ya? Mangrove, sama sekali belum ada berarti? Nanti rencananya skemanya seperti apa untuk? Karena komitmen kita terhadap mangrove *kan* tinggi sekali. Saya minta izin nanti sebelum *break* nanti ini dijawab, biar setelah ini saja.

Pak Haerudin, silakan. Tadi sudah kita lewati, karena keluar masuk.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Kita menghargai Pak Edward lebih duluan, biar hatinya terbuncahkan.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Pimpinan, Anggota yang terhormat,
Ibu Menteri beserta seluruh Eselon I, Pak Sekjen dan seluruh Eselon I KLHK,
dan juga BUMN mitranya Komisi IV dari Kehutanan, dan juga
Seluruh yang hadir pada siang menjelang sore ini,

Sudah siang menjelang sore 13.30.

Kami tidak banyak yang akan kami sampaikan. Semoga pertemuan ini berkah untuk semua. Pertama, tentu kami ingatkan pembahasan yang pertama sampai kita agak *ewuh pakewuh*, Pak Sekjen, karena sikap, kalau memang apa yang kita bahas tidak sampai kepada Ibu Menteri itu bermasalah bagi Pak Sekjen. Kalau di Komisi VIII Pak Sekjen bisa dipersilakan keluar, *enggak* boleh ikut rapat dengan kita, kayak Kemensos. Kenapa begitu? Karena Pak Sekjen tidak menghargai institusi, tidak menghargai keputusan kita.

Yang kedua, ini, Pimpinan, *nih* saya mau tanya. Pak Dedi, Ibu Ketua, coba jawab dulu sebentar ya. Ini yang tulisannya kecil-kecil yang anggarannya juga mengecil mau dibahas di mana, mau terbuka di sini, mau di terbatas? Nanti itu kapan? Kapan? Jawab dulu, jawab dulu. Karena kita dari awal sebenarnya minta ini dibahas dulu baru kita bahas. Jadi Kapoksinya kumpul, lebih *smooth*, lebih menjaga semua pihak. Sebetulnya kenapa kita itu selalu minta di rapat terbatas, Ibu Menteri dan seluruh jajaran, kita semua bisa saling menjaga diri, tidak untuk saling merendahkan atau menghinakan martabat kita masing-masing.

Ibu Menteri, ingin kami sampaikan beberapa hal. Sebetulnya di kita itu *kan* hutan lindung itu dikelola oleh Perhutani dan Inhutani, terutama di Jawa Perhutani. Saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa hutan di daerah Dapil saya terutama di namanya Gunung Gelap, itu hutan lindung dikelola oleh Perhutani. Sejatinya kita ingin itu menjadi kemitraan masyarakat dengan dengan warga dan minta itu di perhutanan sosial *kan*, perhutanan sosial dalam konteks KLHK, karena dengan Perhutani waktunya sebentar. Tapi bukan untuk jadi sawah, untuk jadi investasi kerjasama yang berpanjangan, baik tanaman pinus, baik tanaman bambu, yang kira-kira hutannya terjaga, tidak untuk jadi daerah horti.

Saya ingin sampaikan kepada, ini Mas Wahyunya keluar ini. Sebagai catatan, itu diperjalanan kalau kita ke selatan itu banyak pohon pucuk merah yang mati tapi berdiri. Jadi itu pohon dibunuh di bawah. Jadi itu butuh jadi peringatan kita bagaimana ini jadi solusi untuk kita semua. Sejatinya kalau itu bisa sukses menjadi daerah hutan *Insy Allah*, Bu, jadi solusi ke daerah selatan, ke kampung saya terutama, banjir tahunan rutin setiap musim penghujan dan curahnya tinggi pasti 12 kampung kena banjirnya dan sampai sekarang belum ada solusinya. Kita minta ke PUPR di Bantaeng tidak bisa, minta juga dinormalisasi sungainya belum juga karena *duitnya* kurang karena itu daerah Muara Jabar Selatan itu, terutama kita juga di Garut Selatan. *Nah* hal-hal ini juga yang ingin kita menjadikan prioritas kita bagaimana program kita

itu menjadi penyumbang terbaik merendahnya banjir, bukan menjadi penyumbang terbesar banjir.

Yang terakhir, Pak Dedi, ini *kan* waktu kita ke Bali lihat bambu ya, program bambu yang begitu *wah* dan keren, Kang Dedi sebagai orang sunda, sebagai tokoh sunda ya, Kang Dedi, keturunan raja sunda, *meureun, eh meureun enggak* boleh, nanti diprotes orang. Kira-kira ini *kan* sudah jadi ilmu buhun kita semua di nusantara tentang penanaman pohon bambu karena dia itu punya daya serap air yang baik, itu harus menjadi apa namanya *tuh*, peningkatan, dorongan, *supporting* dari Kementerian harus lebih hebat lagi. Dan orang daerah sekarang hampir-hampir tidak menganggap penting sebagian pada bambu itu, padahal itu pada bambu itu tanaman paling tua, menghasilkan musik paling tua di dunia. Artinya bambu itu adalah pohon peradaban bagi kehidupan manusia *plus* punya manfaat yang begitu luar biasa karena dia punya kemampuan menyerap, menyimpan air dan menyerap air disaat musim penghujan. Tentu ini penting bagi kita semua.

Yang tentu bagi Pimpinan semua dan untuk Anggota semua kita ingatkan yang terakhir, kita ini tentu punya kesempatan bisa bersama-sama melayani masyarakat kita dengan baik di Dapil kita masing-masing. Tetapi kalau aspirasinya berkurang *kan* jadi merendah. Bang Pesona ini saya bahas sekalian *nih*, Kang Dedi, Ibu Anggia, Ibu Ketua, saya bahas sekalian yang salah satunya Bang Pesona dari 10 jadi 8, artinya *kan* berkurang. Terus kalau yang cadangan hutan lestari, *nah* itu butuh dibicarakan itu. Makanya kita dari awal ini ada yang strategis yang kita punya komitmen kemitraan yang kita juga punya komitmen ruang untuk di daerah pemilihan masing-masing harus dibicarakan secara baik.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Wa alaikumsalam.

Silakan, Kang Dedi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Terima kasih, Bu Pimpinan, Pak Haerudin.

Ini saya ikut saja menyempurnakan pernyataan-pernyataan yang hari ini. Yang pertama adalah kalau bicara persoalan lingkungan hidup *kan* menurut saya tugasnya *kan* cuma dua. Yang pertama, menjaga yang sudah ada, hutan yang sudah ada, gunung yang sudah ada, laut yang sudah ada, sungai yang sudah ada dijaga agar kesinambungannya senantiasa terus, tidak lagi ada kerusakan baru, tidak lagi ada penebangan baru, tidak lagi ada pencemaran baru, tidak lagi ada penambangan baru. Ini *kan* tugas kita.

Terus Kemudian yang kedua adalah *me-recovery* yang sudah terjadi kerusakan, gunung yang sudah rusak, aliran sungai yang sudah rusak, hutan yang sudah rusak di-*recovery*. Karena kalau dua-duanya terus berjalan *enggak* akan selesai. Lingkungan hidup *me-recovery* yang baru, kemudian membangun kerusakan baru. *Nah* dari sinilah peta data yang tadi saya sampaikan mulai dipetakan, wilayah mana *sih* yang kita akan fokus melakukan *recovery*, perbaikan, wilayah mana yang memang harus dijaga.

Nah, saya pikir hari ini Kementerian Lingkungan Hidup mendapat berkah. Berkah dari apa? Di era digital ini ada respon publik terutama dari generasi Z terhadap isu lingkungan. Hari ini isu anjing saja bisa viralnya luar biasa, isu ular bisa viralnya luar biasa, isu harimau viralnya luar biasa dan ini menjadi *concern* publik, sehingga pertanyaan saya itu yang pertama kapan *sih* areal yang di Aceh yang dulu kita resmikan yang didalamnya berfokus pada menjaga sumber daya alam untuk menjaga gajah dan harimau itu terus dilakukan optimalisasi setelah diresmikan, sehingga kawasan yang terisi di Indonesia itu bisa dijaga, ditindaklanjuti. Itu yang pertama.

Yang kedua, mencoba untuk Kementerian Lingkungan Hidup itu mensikapi isu-isu sensitif yang viral, misalnya beberapa waktu yang lalu *bayangin aja* ekskavator berhadapan dengan harimau di Sumatera Barat, sehingga pertanyaan saya adalah *loh* kalau eskavator sudah berhadapan dengan harimau berarti yang salah bukan harimau, yang salah eskavator, karena eskavator melakukan perluasan kawasan sawit lagi. *Nah* pertanyaan saya ini mau sampai kapan *sih* sawit itu terus diperluas? Apakah memang kita tidak akan lagi menyisakan ruang untuk konservasi? Apakah kita tidak akan lagi menyisihkan ruang untuk lindung? Apakah kita memang sudah menganggap bahwa negeri ini, kehidupan ini cukup dengan satu komoditi? *Nah* ini harus segera ada penjelasan publik yang disebut dengan menjaga yang sudah ada.

Nah, kemudian dalam pandangan saya, DPR *gitu loh*, kita ini semua Anggota DPR *enggak* ada kaitan urusan aspirasi DPR memperjuangkan kepentingan publik dengan aspek-aspek melemahnya kita daya kritis, saya *enggak* mau itu *gitu loh*, Pak. Saya *enggak* mau Anggota DPR misalnya dapat aspirasi di daerah pemilihannya kegiatan kemasyarakatannya 500 juta kemudian diam terhadap 100.000 hektar tanah hutan yang digunduli, rugi *dong* kita. Kita dapat 50 juta *enggak* ada artinya, 500 juta *enggak* ada artinya, tapi kerusakan hutan dan lingkungan terjadi di mana-mana. Kita *enggak* ada kaitan. Persoalan aspirasi itu adalah persoalan kebutuhan publik yang tidak mesti dikaitkan dengan apapun, tidak mesti dibergandengkan dengan apapun. Sudahlah, itu jalan kalau itu dianggap sebuah kebutuhan. Tapi kalau dianggap bukan sebuah kebetulan juga tidak apa-apa tidak ada, asalkan Kementerian Lingkungan Hidupnya dan Kehutanannya berjalan dengan baik.

Nah, bicara persoalan pendapatan, kenapa misalnya tadi kita fokus kenapa *sih* 713, kenapa *sih* 3,5 juta? Karena bagi saya, bagi kami, Komisi IV itu di situ ada letak apa? Ada letak kerugian negara yang berlangsung berpuluh-puluh tahun, ada nilai pendapatan yang tidak masuk ke kas negara, dan itu kalau ditotal, dikalkulasikan, diumumkan pada publik ada puluhan triliun

dana. *Bayangin* pengusaha itu sudah dia dapat tempat *nambang* di satu tempat, resminya misalnya 100 hektar, tapi bisa jadi dia *nambangnya* babatnya itu 1.000 hektar. Tambangan jangankan di Kalimantan, jangankan yang di Sumatera yang luas, di Jawa *aja*, di Jawa Barat *aja* kalau izinnya di sini penambangan batu 10 dia *nambangnya* ke sini, *enggak* di sini, *nambangnya* ke sini, izinnya di sini *nambangnya* ke sini, itu tidak terdeteksi seiring dengan kewenangan lari ke gubernur *gitu loh*, itu tidak terdeteksi, berantakan dimana-mana. Kalau bicara penambangan jangankan di Kalimantan, jangankan di Sumatera, di Jawa Barat yang dekat-dekat sini *aja* penambangan batu pakai bahan peledak dibiarkan, penambangan pasir dibiarkan, semua kalau dibiarkan *enggak* ada yang peduli. Kenapa *enggak* ada yang peduli? Bicara kewenangan, Kabupaten, Satpol PP bukan kewenangan saya, izinnya sudah di Kementerian, Kementerian *enggak* ada petugasnya. Ini *kan* kehancuran ini terus berlangsung.

Ibu kalau pergi ke daerah Bandung misalnya, yang dekat *aja*, saya *enggak ngomong* Kalimantan dulu karena di sana jauh lebih luas, itu di daerah yang terowongan menuju Garut itu Kang Haerudin, itu di sepanjang jalan itu sudah plang *tuh* tanah milik PT ini dan gunung itu ditambang. Saya *ngebayang* PU *bikin* terowongan yang mahal itu suatu saat itu akan longsor tertimbun. Oleh apa? Oleh gunungnya yang dibabat. Ini baru satu tempat. Apalagi di berbagai tempat lagi di seluruh Jawa barangkali, ini yang terjadi. *Nah*, keluhan publik di media sosial yang sering saya terima itu rata-rata adalah penambangan dan kalau berhadapan dengan penambangan seolah-olah tak ada satupun orang yang bisa menghadapinya, baik pada skala lokal maupun pada skala yang lebih besar. Ini yang menjadi *concern* kita. Sehingga menurut saya ke Bu Menteri, makanya tadi saya tegaskan mari kita bicara secara terbuka, kalau memang tidak di forum ini ya forum tertutup *deh enggak* apa-apa, apa *sih problem* yang dihadapi ini sehingga *problem* ini *kok* dari tahun ke tahun *enggak* berubah, itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi, *kok* perasaan lingkungan makin rusak, bukan makin baik. *Nah* kita bicara terbuka. Misalnya persoalan reboisasi, saya tahu *lah* Perhutani *enggak* ada biaya untuk *nanam*. Sudah *aja* misalnya program reboisasi fokuskan di tanah Perhutani, tapi tidak lagi untuk diproduksi, untuk lindung, daripada capek-capek *bikin* gerakan di tempat lain, sudah saja. Sudah ada petugasnya, sudah ada yang digaji, bikin areal-areal yang untuk daerah-daerah konservasi, daerah perlindungan buat masyarakat, ini yang penting.

Sehingga terakhir saya nitip pesan buat Ibu Menteri untuk berhati-hati juga dalam melakukan kebijakan-kebijakan perubahan struktur lingkungan kehutanan, di lingkungan Perhutani juga hati-hati. Karena apa? Karena otak publik di kita ini semuanya sudah *duit*, dari mulai rakyat sampai pejabat sama *kok duit*, tidak ada sedikit berpikir lingkungan. Bagi saya hutan itu walaupun menghasilkan orang yang tidak kaya, walaupun secara ekonomi statis ekonominya karena ada hutan, tapi ingat manusianya sejahtera. Dimana sejahteranya? Di areal sekitar hutan orang dapat air bersih, di areal sekitar hutan orang dapat kayu bakar untuk memasak, di sekitar areal hutan orang bisa beternak, di sekitar areal hutan orang dapat tanaman tumbuhan yang itu untuk kehidupan. Tunjukkan pada saya orang yang di sekitar areal hutan mengalami kemiskinan, tolong tunjukkan! Yang kelaparan tolong tunjukkan! *Enggak* ada! Tapi terbalik, setelah hutan dieksploitasi, mie instan masuk ke

kampung-kampung, ketika sedikit banjir, masyarakat kemudian hilang penghasilannya yang secara alamiah, kemudian tergantung pada bantuan, tergantung pada bantuan. Pola-pola seperti ini akan melahirkan kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural dalam jangka panjang.

Nah, sehingga di terakhir ini saya menanyakan, Pak Wamen, bagaimana nasib yang di Kalteng yang pernah bersama saya datang? Kemudian Pak Dirjen Penegakan Hukum, bagaimana nasib kunjungan kami waktu pergi ke Jambi, apa tindak lanjutnya? Bagaimana yang di Bangka Belitung, apa tindak lanjutnya? Bagaimana kunjungan kami ketika ke Jawa Tengah yang ada pencemaran air sungai oleh salah satu pabrik tekstil, apa tindak lanjutnya? Termasuk juga saya menanyakan kembali lagi Dirjen Penegakan Hukum menutup tambang yang di wilayah Karawang, tetapi Dirjen Planologi mengeluarkan izin untuk perusahaan tersebut, ini juga harus segera dibereskan.

Saya *nitip* saja, urusan lingkungan bagi saya *enggak* mesti ditukar sama apapun. Yang penting Bapak dan Ibu bisa bekerja dengan baik, tidak main-main, konsisten lurus bagi lingkungan, kita akan mendukungnya.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih, Kang Dedi.

Bapak/Ibu sekalian,

Saya menawarkan, karena ini sudah hampir Jam 2 dan kita juga belum makan siang dan belum sholat, kita *break* dulu untuk istirahat sebentar. Bagaimana, Bapak/Ibu, setuju? Bu Menteri? Selamat Tahun Baru, Bu Menteri, semoga 2022 sehat semuanya, sukses kita semuanya.

Baik, terima kasih. Saya skors, kita masuk lagi jam 2.30. Oke, setuju? 2.30, makannya yang banyak. *Dok*, minta tolong. Kita 2.30 ketemu lagi. Saya akhiri.

*Wallaahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

(RAPAT DISKORS PUKUL 13.46 WIB)

(SKORS DICABUT)

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

(*Rapat tidak terekam*) dimana kami banyak melihat, banyak mengawasi juga perkembangan-perkembangan terkait penggunaan kawasan lahan yang nanti akan atau sudah ditentukan untuk menjadi areal ibukota negara. Saya menyoroti saja, Ibu Menteri, karena memang bersentuhan dengan daerah pemilhan Kalimantan Timur dan tadi Ibu Menteri juga sudah menjabarkan capaian-capaian KLHK ya selama ini beberapa tahun terakhir, juga khusus permasalahan deforestasi yang kita lihat datanya juga menurun secara signifikan setelah banyaknya *policy* (kebijakan-kebijakan) yang menopang untuk menurunkan angka deforestasi tersebut. Namun saya harus kemukakan juga ancaman terhadap turunnya deforestasi ini, ancaman yang masih nyata menghantui lingkungan alam khusus hutan-hutan kita yang ada. Saya bicara di sini Pulau Kalimantan lebih khususnya Kalimantan Timur, ancaman ini salah satunya adalah praktek-praktek pertambangan ilegal yang banyak masuk merusak Kabupaten/Kota penyangga daerah calon ibukota negara itu. Saya memohon dalam forum rapat kerja ini KLHK sebagai ujung tombak penjaga lingkungan hidup di Indonesia memberi perhatian khusus masalah ini. Mari kita sama-sama menggunakan momentum pemindahan ibukota negara ini untuk mengawasi areal-areal yang sekarang masih terancam. Lubang-lubang yang sekarang banyak ditemukan di Kaltim ditinggal akibat praktek-praktek yang tidak bertanggung jawab, saya minta KLHK untuk turun mengawasi masalah ini. Sudah banyak laporan yang kami terima juga diterima oleh komisi-komisi lain di DPR RI, sudah disebutkan beberapa waktu yang lalu. Ini kita gunakan momentum juga untuk bukan cuma memperbaiki, merehabilitasi nanti daerah yang akan rencananya dibangun ibukota negara baru ini, tetapi juga daerah-daerah Kabupaten/Kota penyangga di luar areal 260 ribu hektar ibukota negara tersebut. Saya sudah titipkan masalah ini melalui forum Pansus pada saat itu dan sekarang saya tegaskan kembali ke KLHK. Saya yakin di daerah teman-teman mungkin bukan cuma Kalimantan Timur, nanti ada yang ingin menitipkan hal yang sama karena ancaman ini sudah begitu nyata. Sangat sayang kalau capaian deforestasi yang sudah Ibu canangkan dan implementasikan selama ini terganggu karena masalah ini. Ini masalah kehormatan bangsa juga. Kita akan menjadi tuan rumah G20, tadi Pak Ketua sudah kemukakan masalah-masalah ini adalah masalah serius. Penggunaan kawasan yang tidak semestinya, penggunaan hutan yang diluar peraturan perundang-undangan, mohon ketegasan dan pengawasan Ibu Menteri dan tim KLHK, kalau membutuhkan data yang konkret ya saya *gampang* nanti tinggal menyertakan areal-areal yang terindikasi mendapatkan musibah lingkungan seperti ini.

Terima kasih, Bu Menteri, atas tadi penjelasan evaluasi 2020-2021, tetapi juga rencana kerja tahun 2022. Banyak sekali komitmen-komitmen Indonesia ini menuju pembangunan yang lestari, yang berkelanjutan. Mari kita bersama-sama menghargai satu sama lain dan memperhatikan ini masalah-masalah, ancaman-ancaman yang masih nyata di depan mata. Terima kasih atas perhatian Ibu Menteri, Pak Wamen.

Sekarang saya akan persilakan kepada teman-teman Komisi IV yang sudah mendaftar. Pertama Bang Muslim, tidak ada, kita cadangkan terlebih dahulu Bang Muslim. Bu Endang Thohari, silakan, Bu Endang.

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS, M.Sc.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Ibu Wakil Ketua dan Ibu Menteri, Pak Wamen, Bapak dan Ibu Eselon I yang saya banggakan.

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Menanggapi dan menindaklanjuti tadi khususnya dari Partai Gerindra, saya ingin menambahkan pendalaman di Dapil. Jadi kami sudah mengunjungi beberapa lokasi yang ada di daerah Cianjur dan Bogor, ternyata memang, untuk Pak Sekjen ini, banyak sekali kekurangan penyuluh kehutanan di cabang dinas kehutanan wilayah IV Jabar dan juga PPL. *Nah*, ini mohon ada perhatian, karena juga daerahnya luas, perlu kendaraan yang untuk mengakses ke lokasi binaan yang cukup jauh. Kemudian juga ada permasalahan yang sangat besar yaitu di Gunung Pangrango, di sana ternyata banyak sekali petugas-petugas kita yang belum diangkat, jadi masih Plt. *Nah*, ini perlu ada penggantian yang resmi, karena mereka jadi bekerjanya setengah-setengah, walaupun kalau saya lihat memang bukan main dedikasinya. *Nah*, mohon diperhatikan.

Kemudian untuk Direktorat Jenderal PSLB3, ternyata Cianjur sekarang makin kotor karena memang tidak ada tempat untuk pengelolaan sampah yang ideal. Jadi tolong, Bu Fifin, kalau Bogor sudah mulai bagus, ternyata di Cianjur ini malah di jalan-jalan rayanya, karena kemarin itu saya lihat semua di pinggir jalan Cianjur banyak sekali sampah yang belum dikelola dengan baik. Kemudian di lokasi pemukiman yang sempit, itu juga belum dibangun tempat-tempat sampah yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat maupun roda tiga, *nah* ini tolong diperhatikan. Kemudian untuk Direktorat Jenderal PSKL ternyata program budidaya lebah madu yang sangat menguntungkan ini belum ada pembinaan yang ideal, padahal Perhutani kita *kan* terkenal itu madunya, *nah* mohon ada kordinasi yang baik.

Yang berikutnya untuk BP2SDM, jadi tadi saya ingin ada peningkatan kapasitas anggota kelompok tani hutan khususnya di Desa Cibarengkok dan Sukajaya, juga di Kecamatan Bojong Picung itu ternyata ada pengelolaan saga, pohon saga, yang bisa sekali untuk substitusi kedelai. Jadi ini mohon diperhatikan, karena sudah banyak sekali tenaga-tenaga ahli dari negara luar yang meninjau, *nah* ini saya khawatir plasma nutfahnya diambil oleh orang asing.

Kemudian untuk PDASLH, ternyata banyak sekali genangan air banjir yang ke kota Bogor dan Cianjur karena tadi yang dikemukakan oleh teman-teman dengan adanya penggundulan-penggundulan hutan yang dikelola oleh, mohon maaf ini, oknum-oknum tertentu dan adanya daftarnya itu, ada daftarnya, sehingga saya juga diminta untuk membebaskan dan dikembalikan kepada rakyat. Tetapi rakyat tadi siapa yang di belakangnya? *Nah*, jadi saya juga khawatir terjadi sengketa yang tidak berkelanjutan.

Kemudian untuk KSDAE, jadi tadi saya sudah sempat kemukakan tentang Plt, tapi di daerah tersebut juga ditetapkan sebagai cagar biosfer. *Nah* biosfer ini salah satunya adalah bagus kalau menurut saya, tapi hanya *branding image* karena pengelolaannya tidak ada alokasi dananya. *Nah*, jadi mereka juga khawatir kalau hanya *branding image* meresahkan masyarakat setempat. Kemudian juga peraturan-peraturan dari pemerintah daerah setempat tidak mendukung, jadi perlu ada sosialisasi atau bimbingan teknologi yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat. *Nah*, kemudian di Gunung Gede Pangrango juga ada 10 jenis tumbuhan asli, Bu. *Nah* ini saya khawatir plasma nutfahnya terimbas kemana-mana khususnya ke luar negeri karena ada hal-hal yang penting yaitu ada beberapa tanaman yang melalui bioprospeksi tumbuhan tersebut bisa dikembangkan dengan baik. Tentu saja bisa bekerja sama dengan Badan Litbang Pertanian yang sekarang sedang resah sebetulnya, karena para penelitiannya sedang dikelola oleh *brand*. *Nah*, untuk itu saya ingin bekerja sama dengan tanaman rempah dan obat yang ada di Cimanggu di Bogor untuk mengelola hal-hal tersebut karena sangat penting ini, ada sepuluh bioprospeksi yang bisa dikelola dengan baik dan dijadikan tumbuhan tanaman obat yang bermanfaat.

Hanya itu mungkin dan semua sudah saya tulis dengan baik, dengan lokasinya, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh Pak Sekjen dan jajarannya.

Demikian, Pak Ketua.

Terima kasih.

*Billaahit Taufiq Wal Hidayah,
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih, Bu Endang Thohari.

Berikut kami persilakan Pak Salim Fakhry dari Partai Golkar. Silakan abangku.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E, M.M.):

Baik.

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Pimpinan yang kami hormati,
Ibu Menteri, Wamen, Pak Sekjen dan Teman-teman,
Yang kami hormati Bapak/Ibu Anggota Dewan yang kami hormati,

Pertama-tama setelah pemaparan daripada Ibu Menteri masalah target tahun yang lalu dan tahun yang akan datang secara pribadi kami apresiasi apa yang Ibu lakukan selama satu tahun anggaran tahun 2021. Mudah-mudahan 2021 sudah kita lalui, kini saatnya kita beranjak ke 2022.

Pertama, Ibu Menteri, tadi Ibu sudah memperkenalkan beberapa Eselon I yang sudah Ibu percaya. Terima kasih, selamat bekerja kepada mitra kami yang sudah dipercaya menduduki jabatannya.

Yang kedua, kami berharap, Bu, masih banyaknya jabatan-jabatan yang kosong terutama Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Lauser, saya kira sudah beberapa kali di-Plt-kan, Bu. Mohon harapan kami perhatian dari Bapak Sekjen, Ibu Menteri dan kawan-kawan untuk mengisi jabatan definitif. Baru Plt sudah diganti, Bu, jadi Plt lagi. Ini harapan kami.

Ibu Menteri yang kami hormati,

Ada catatan, Bu, masalah aspirasi bantuan dari Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, kami dapat tiga paket, Bu. Aceh Utara mendapat 3 titik lokasi, kami alokasikan yang pertama di Pesantren Al Radiyah, namun sampai saat ini, Bu, pekerjaannya instalasi perpipaan tidak dipasang sampai ke pembuangan akhir yang telah disepakati waktu diverifikasi. Yang kedua, Pesantren Raudatul Islam, volume dikurangi oleh pihak ketiga, tidak sesuai dengan gambar RAB instalasi perpipaan dalam kondisi tidak dipasang. Yang ketiga, Pesantren Darul Qur'an, penanaman pipa dari sumber kotoran sampai ke bak penampungan terlalu dangkal, sehingga banyak pipa yang pecah, kemudian bak kontrol lebih tinggi daripada permukaan, sehingga penyaluran ke pembuangan air tidak dapat berfungsi. Hingga saat ini pengerjaan untuk tiga titik tersebut belum selesai seratus persen. Kami tidak menyalahi, Bu, cuma sekedar mengingatkan akibat daripada pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab, sementara tahun anggaran sudah habis. Mohon kiranya direspon. Kalau beginilah setiap Anggota DPR dikasih dengan niat tulus program dari Kementerian namun tidak dapat dipergunakan apalah jadinya. Ini harapan kami kepada Ibu Menteri khususnya dan Bapak/Ibu Dirjen pada umumnya.

Selanjutnya yang terakhir, Pak Ketua, setelah kunjungan kami ke Dapil ada yang disampaikan dikeluhkan kepada kami sebagai Anggota DPR dari Dapil Aceh I. Ada satu perusahaan yang menyampaikan surat secara resmi kepada Ibu Menteri tentang permohonan perlindungan keringanan ganti rugi material, surat tertanggal 29 November yang terhormat Ibu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup, karena perusahaan ini setelah kami di lapangan perusahaan ini Pak Sekjen sudah pernah kena pidana karena masalah kebakaran hutan, Ibu Menteri. Kebakaran hutan perusahaan ini sudah dipidana kurungan penjara dan denda dan saat ini perdatanya memang ada, kalau tidak salah sekitar 140 miliar. Mereka membuat surat secara resmi kepada Ibu Menteri seperti yang saya katakan tadi, namun surat tersebut belum dijawab sampai sekarang, Bu. Tujuan kami apa? Untuk mengingatkan agar pada masa reses yang akan datang andaikan ini dipertanyakan kami sudah bisa jawab.

Mohon kiranya, karena niat perusahaan tersebut mempunyai niat baik untuk membayar pajaknya, saya kira perlu ada respon dari Kementerian Kehutanan.

Saya kira itu saja, Pak Ketua. Banyak kali pun nanti ada yang *walk out*, Pak Ketua. Barusan, itu saja sementara.

Terima kasih. Mohon maaf, Bu, apabila ada tutur kata yang kurang pas.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih, Bang Salim.

Berikut kami persilakan Pak Made Urip dari Fraksi PDI Perjuangan. Pak Ansilena? Tidak ada juga? Ibu Alien Mus?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Yang lain dulu.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Oh yang lain dulu? Oke.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Saya terakhir, Pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Ibu Renny Astuti.

F-P.GERINDRA (RENNY ASTUTI, S.E., S.P.N.):

Terima kasih, Ketua.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota DPR RI, Ibu Menteri, Wakil Menteri beserta jajarannya,

Tidak banyak yang saya sampaikan, ada dua hal. Yang pertama sekedar mengingatkan kembali saja bahwa kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan harus memadukan pertimbangan lingkungan dengan ekonomi dan sosial, karena mengingat program perhutanan sosial dibuat agar konservasi hutan disertai terciptanya penghidupan bagi masyarakat sekitar. Hal ini penting karena 34% dari seluruh desa di Indonesia berada di perbatasan atau di dalam kawasan hutan dan diketahui jutaan masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor kehutanan. Itu yang pertama.

Yang kedua aspirasi dari Dapil, Ibu. Beberapa kali kami kunjungan ke Dapil. Saya beserta Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Dapil saya Sumatera Selatan I beberapa kali kami mengunjungi rumah sakit-rumah sakit, ternyata di Sumatera Selatan ini penyediaan fasilitas pengelolaan limbah B3 yang dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan ini masih sangat memprihatinkan, karena ternyata hampir semua rumah sakit di Sumsel ini tidak memiliki insenerator. Mereka menyimpan limbah-limbah ini dalam kondisi yang menurut saya juga sangat memprihatinkan karena mereka harus menunggu pihak ketiga untuk mengambil limbah-limbah yang disimpan ini untuk dikirim ke Tangerang. *Nah*, saya menyampaikan kepada Ibu ini mohon menjadi perhatian Ibu, karena setahu saya di Sumatera itu insenerator itu hanya ada di Padang. Dulu kita pernah Kunspek ke sana dan menurut saya juga walaupun limbah ini harus dikirim ke Padang ini sangat tidak memungkinkan. *Nah*, ini mohon menjadi perhatian serius, Ibu, karena hampir seluruh rumah sakit yang kami kunjungi tidak mempunyai insenerator. Mudah-mudahan aspirasi ini juga menjadi perhatian dari Ibu untuk Dapil Sumatera Selatan I.

Terima kasih, Ketua.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih, Ibu Renny.

Berikut Ibu Nur'aeni.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV, Ibu Menteri serta Pak Wakil dan Jajaran Eselon II Kementerian KLHK,

Mengevaluasi dari program kerja serta kebijakan di 2021, pertama memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas capaiannya di angka kurang lebih 96,61%. Hanya saja memang yang sangat disayangkan, Ibu Menteri, dari serapan anggaran ini terlihat bahwa serapan yang dilakukan terkesan diakhirkkan di akhir tahun serapannya. Setelah kita lakukan evaluasi di pertengahan tahun ternyata serapan dari Kementerian LHK ini *kan* awalnya masih rendah, akan tetapi dipadatkan di akhir tahun terkesan hanya untuk mencapai serapan yang setinggi-tingginya. Dengan kondisi seperti ini mungkin yang saya khawatirkan Kementerian LHK-nya berfokus untuk serapan yang

tinggi di akhir tahun, akan tetapi tidak terlihat terhadap pengaruh dari kualitas lingkungan hidup serta pertumbuhan kelestarian kehutanan yang semakin membaik. Mungkin ini harus dievaluasi secara bersama, Ibu Menteri. Dan berikutnya bahwa dari beberapa Dirjen yang ada di Kementerian LHK, saya melihat seperti program dan kegiatan yang dilakukan beberapa Dirjen seperti KSDHE juga belum berjalan di Dapil saya dan saya melihat hanya beberapa Dirjen seperti di PSKL ada juga program KBR serta program Bang Pesona. Ini juga harus ditingkatkan, termasuk di Dirjen Persampahan, ini luar biasa dan sudah sangat membantu sekali dan mengucapkan terima kasih.

Untuk kaitan dengan program kegiatan di tahun 2022 sebetulnya KLHK sendiri ini masuk dalam kerangka program prioritas nasional. Luar biasa, dari 7 program prioritas salah satunya LHK. Betapa pemerintah ini memandang penting, perlu, serta strategis mengapa LH ini menjadi masuk ke dalam prioritas nasional, salah satunya mungkin program prioritasnya yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, pembangunan rendah karbon, dimana dari beberapa strategi pembangunan yaitu meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca, nanti ini mohon dijelaskan mau seperti apa sebetulnya arah kebijakan yang diambil oleh LHK ini kalau mengacu terhadap RPJM serta RKP yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. *Nah* tentu untuk mewujudkan RKP, apalagi dengan tema yang luar biasa, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, ini *kan* dibutuhkan dukungan regulasi pendanaan yang cukup serta kelembagaan. Yang ingin saya koreksi bahwa dukungan regulasi kita sudah punya, baik Undang-Undang Omnibuslaw, IKN dan dari sisi pendanaan ini *kan* berbanding terbalik, sementara LHK dengan diberikan penugasan yang luar biasa, regulasi sudah disusun, tapi tidak diberikan pendanaan yang cukup signifikan. Ini mau seperti apa dan mau diapakan? Apalagi undang-undang seperti IKN ini sudah ditetapkan. Ini *kan* harusnya dicanangkan dan dirancang oleh KLHK sendiri yang harus dipersiapkan dari tahun 2022 ini, tidak asal-asalan. Tadi benar kata Pak Budi tadi Pimpinan menyampaikan, jadi kawasan yang ada di Kalimantan sana yang harus beralih fungsi menjadi pusat pemerintahan, *nah* ini kesiapannya seperti apa. Jadi semangatnya harusnya tidak melakukan kerusakan lingkungan, melestarikan lingkungan yang ada serta tidak melakukan pemotongan atau penebangan hutan. Mestinya yang harus diperbanyak adalah melakukan reboisasi di tiap-tiap wilayah.

Yang berikutnya harus didukung secara kelembagaan. Saya melihat dukungan kelembagaan ini masih tumpang tindih dan masih belum terintegrasi satu sama yang lain. Contoh kemarin kami sudah melakukan, mendengarkan penjelasan dari Perum Perhutani, Perum Perhutani yang tidak mampu untuk melakukan, tidak ada dana untuk melakukan reboisasi ataupun tidak banyak untuk bisa memanfaatkan lahan-lahan Perhutani yang tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ini *kan* sangat disayangkan, karena memang ada sekat dimana antar kementerian ini berbeda arah kebijakan serta target sasaran yang akan dicapai. Ini mohon untuk dievaluasi secara menyeluruh. Tidak mungkin RKP memiliki semangat yang tinggi, memulihkan ekonomi tetapi dari tiga sisi tadi tidak diberikan ruang itu. Apa yang dilakukan?

Terakhir, aspirasi dari Dapil ini kami dari pemerintah provinsi sudah melayangkan surat kaitan dengan Tahura yang ada di Kabupaten Pandeglang, akan tetapi rekomendasi atau surat keputusan dari Kementerian LHK ini belum juga turun. Ini ada apa sebetulnya dan mohon Ibu Menteri untuk membantu secepatnya agar segera turun.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih, Ibu Nur'aeni.

INTERUPSI F-PG (TETI ROHATININGSIH, S.Sos.):

Izin, Pimpinan, bisa tambahan baru?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Ya, saya persilakan Ibu Alien dulu. Ibu Alien masih mau memberikan waktunya?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pasti saya mau, Pak. Tapi kalau ada yang baru silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Oh silakan. Silakan Ibu perkenalkan dulu, Bu, biar Bu Menterinya kenal sama Ibu.

F-PG (TETI ROHATININGSIH, S.Sos.):

Ya, terima kasih, Ketua.

Saya dari Fraksi Golkar, Nomor Anggota 308, Jateng VIII Banyumas-Cilacap.

Yang saya hormati Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV,
Yang saya hormati Ibu Menteri KLH beserta jajaran,

Ini aspirasi dari Kabupaten Cilacap, Ibu, kaitannya dengan program PTSL. Ini sebetulnya *sih* bukan itu, tapi menyangkut dengan wilayah Ibu. Ada satu wilayah, beberapa wilayah desa di Kabupaten Cilacap itu sudah menepati beberapa tahun menjadi satu wilayah dan ditentukan oleh Gubernur Jawa Tengah satu wilayah definitif tapi tanah itu dulu memang Kehutanan. Sekarang kalau minta program PTSL dan Kementerian ATR/BPN *kan* tidak bisa, kecuali ada pelepasan dari Kementerian LH. *Nah*, ini prosesnya seperti apa, Ibu?

Barangkali nanti pas Ratas dengan Bapak Presiden Ibu koordinasi dengan Menteri ATR/BPN agar aspirasi masyarakat Kabupaten Cilacap yang kurang lebih 1.400 KK statusnya masih mengambang. Jadi sudah definitif jadi satu wilayah dikelola oleh Gubernur tapi status tanahnya masih belum ada. Begitu, Bu Menteri.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih.

Ibu Alien Mus, silakan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Baik.

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IV yang *Alhamdulillah* hari ini hadir lima-limanya,

Luar biasa, ini ada satu reputasi yang baik buat pimpinan kita. Tepuk tangan dulu, jarang ini lima-lima bisa hadir.

Tentunya yang saya hormati Ibu Menteri, Pak Wamen, dan juga Sekjen beserta Jajaran Eselon I yang *Insyah Allah* kita selalu dalam lindungan *Allah Subhaanahu Wa Ta'ala*.

Bu Menteri, *straight to the point*, kasuistis, kita melihat bahwa beberapa waktu lalu Ibu Menteri baru saja mencabut beberapa izin kawasan yang dibilang sangat *shock*, terkesan ada kepentingan tersendiri, terkesan bahwa terburu-buru, terkesan bahwa tiba saat tiba akal. *Sorry to say*, Ibu Menteri, seharusnya pencabutan satu kawasan hutan yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah, baik Provinsi dan juga diajukan kepada pemerintah pusat cq-nya ada di Kementerian LHK tidak langsung dicabut sesuai dan tanpa ada satu peringatan dan sebagainya, ini sangat disayangkan. Kemudian ada di beberapa wilayah dan termasuk di wilayah saya juga, Ibu Menteri, di Maluku Utara, dasarnya apa, bagaimana, itu *kan* perlu kita ketahui.

Kemudian kita melihat persis bahwa di IKU (Indeks Kualitas Udara) 2020-2021 naik trendnya, Indeks Kualitas Air laut (IKAL) juga naik, Indeks Kualitas Lahan (IKL) juga naik, semuanya hampir rata-rata Indeks Kualitas Air (IKA), IKTL, IKEGA dan juga FG dan juga IKL semua, *oh* yang turun IKTL dan

juga indeks kualitas air. Tentunya tahun 2021 IKLH ini adalah sebesar 71,41 karena Ibu Menteri selalu mendatakan, memberikan data dan kita juga berbicara berdasarkan data, meningkat 1,14 poin dibanding dengan tahun 2020. Namun beberapa indikator yaitu IKTL dan IKA mengalami penurunan dari tahun 2020. Selain itu beberapa indikator belum mencapai target yang ditetapkan yaitu indeks kualitas air 55,20, realisasi 53,33, indeks kualitas udara targetnya adalah 87,23, realisasinya adalah 84,20, indeks kualitas tutupan lahan dan target 62,90. Perlu adanya pendalaman penyebab indeks belum mencapai target yang ditetapkan serta penyebab indeks tutupan lahan dan indeks kualitas air malah turun. Khusus indeks kualitas tutupan lahan sejak tahun 2020 sesuai dengan catatan yang disampaikan kepada kami perlu diperdalam lagi apakah yang mengalami penurunan terjadi di kawasan hutan atau non kawasan hutan mengingat laporan diforestasi dari KLHK yang menurun dan sejak 2 tahun terakhir program-program RHL giat dikerjakan dan mengambil porsi APBN yang cukup besar. Terus kita tahunya nilai ekonomi Bruto pemanfaatan limbah B3 dan limbah non B3 besar dan ini memakan biaya hampir 21,265 triliun. Atas nilai sebesar ini, siapakah yang mendapatkan manfaatnya? Negarakah? Rakyatkah atau segelintir pengusaha?

Kegiatan di Dirjen PDASHL selama tahun 2015 sesuai data yang disampaikan sampai 2021 sudah berhasil memulihkan DAS seluas 1.311.612 hektar. Jika dibandingkan 14 juta hektar lahan kritis, maka diperlukan waktu puluhan tahun untuk merehabilitasi lahan-lahan kritis yang ada. Belum lagi tidak adanya jaminan lahan yang sudah dipulihkan atau direhabilitasi untuk dapat mempertahankan menutup hutannya sebagai contoh di Suaka Margasatwa Paliyan di Gunung Kidul pada tahun 2000-an kondisinya sangat kritis dan ini menjadi atensi kita semua. Saya mau menanyakan juga di, *kan* karena ada 4 pilar, pilar ekonomi yang penting sekali kita lihat adalah sektor kehutanan ikut menyumbang kinerja positif pembentukan produk domestik Bruto, sub sektor kehutanan yang pada tahun 2021 terganggu akibat pandemi covid 19. Walaupun PDB sektor kehutanan tahun 2021 turun dari tahun sebelumnya karena pandemi, namun selama tahun 2021 nilai ekspor kayu olahan yang sudah disampaikan oleh Pak Suhardi tadi mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar 3,6 miliar USD dimana produk *woodchip veneer dan flanel* menjadi jenis dengan peningkatan produksi tertinggi. Namun yang perlu dipertanyakan adalah berapa banyak pengusaha industri kayu atau UMKM yang terlibat dalam kenaikan nilai ekspor tersebut?

Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pertumbuhan jumlah pengusaha dari level UMKM menjadi industri yang bergerak di sektor pengolahan hasil hutan? Tujuan ekspor kayu olahan yang terbesar adalah ke Tiongkok yaitu sebesar USD 3,9 miliar dan kemudian Amerika Serikat sebesar USD 2,4 miliar. Namun yang menjadi catatan adalah adanya keluhan bahwa SVLK, Sertifikat Legalitas Kayu yang tidak diakui Eropa dan Jepang. Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi agar SVLK bisa diterima di Eropa dan Jepang. Jika hal ini terjadi bukan tidak mungkin nilai produk hasil kayu olahan bisa jauh lebih meningkat.

Kemudian saya kemarin, Bu Menteri, mohon maaf, saya mau menanyakan tentang progress pelaksanaan program perhutanan sosial hingga akhir tahun 2021...

INTERUPSI WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Izin, Pimpinan.

Kayaknya Bu Alien ini spesial ini, *kok* sudah hampir 6 menit.

Terima kasih.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan, maaf, baru datang. Tolong, saya tadi saya sudah memberikan kesempatan kepada yang lain.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Lanjut, Bu Alien. Lanjut, lanjut.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ini Pimpinan baru masuk-masuk langsung, belum kenal sama Alien Mus ya, Pak?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Kan begini, kita *kan* waktunya hanya 3 menit.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Sebentar, Pak! Bapak jangan mempengaruhi konsentrasi saya, saya sangat. Ini Bapak *gimana* ya. Telah mencapai 4,81 juta hektar yang juga diikuti dengan jumlah kepala keluarga yang terlibat mencapai 1.048 ribu KK serta perkembangan jumlah izin yang diberikan mencapai sebanyak 7,261 unit surat keputusan SK. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam perhutanan sosial secara umum? Bagaimana kondisi dan fungsi ekologis lahan yang telah diserahkan kepada masyarakat dalam rangka perhutanan sosial? Apa dan bagaimana strategi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perhutanan sosial? Bagaimana realisasi perhutanan sosial pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

Kemudian, Ibu Menteri, yang terakhir, Ketua Bapak Rusdi Masse yang terhormat, terakhir ini, saya ingin mempertanyakan tentang perjalanan kami kemarin di Kalimantan Timur di Mentawir, di sana ada izin yang diberikan kepada salah satu perusahaan yang disingkat PPCI itu melakukan penambangan terhadap batu bara yang memberikan satu masalah dampak

yang besar terhadap lingkungan baik dalam lingkungan perhutanan setempat seperti kayu-kayu pun mati, airnya dicemari tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakatnya, tetapi sampai saat ini belum ada kabar dari penyelesaian Gakkum. Nanti, tolong kami diberitahukan apakah perusahaan tersebut telah dipanggil dan telah dikondisikan, dikonfirmasi dan diklarifikasi atau belum. Apabila terjadi tumpang tindih izin yang dikeluarkan tolong kami juga disampaikan.

Bu Menteri, terakhir Dapil, terakhirnya dua kali, di Maluku Utara tentunya sudah diketahui banyak sekali izin yang dikeluarkan untuk tambang nikel dan tambang emas. Terus yang saya mau sampaikan izin-izin yang Ibu tarik kemarin yang sesuai pelepasan kawasan hutan, apakah mereka sudah mendapatkan Amdal atau belum? Terus kenapa dikeluarkan lagi izin yang baru terhadap beberapa perusahaan tertentu? Apakah mereka juga sudah mendapatkan rekomendasi dan sudah mendapatkan izin Amdal atau belum? Jangan sampai Bu Menteri di satu tempat yang sama ada dua izin yang dikeluarkan, satu berdasarkan yang izin yang direkomendasikan oleh Bupati, satu berdasarkan izin yang direkomendasikan oleh Gubernur. Karena bupatinya lain sekarang, gubernurnya lain, jadi beda lagi ini rekomendasinya. Tentunya seperti yang kami sampaikan setiap izin yang dikeluarkan, baik di kawasan hutan lindung maupun di sekitarnya, tolong dilihat lagi letak dan geografis dari peta wilayah tersebut agar menjadi satu acuan dan bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakatnya. Saya inginkan, Pak Ketua, Pimpinan, saya berharap bahwa IPPKH ini selalu menjadi masalah. Tolong kita yang ada di Komisi IV ini menjadi attensi yang luar biasa terhadap IPPKH ini selalu sering disalahgunakan. Saya mengusulkan apabila berkenan, Pimpinan, kita mengusung Panja IPPKH, karena ini menjadi attensi kita semua dan dampaknya untuk masa depan bagi bangsa dan negara. Setuju, Ketua? *Alhamdulillah.*

Terakhir udah, mohon maaf apabila ada salah kata.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (RUSDI MASSE MAPPASESSU):

Terakhir, itu tujuannya Panja ya?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

Mohon maaf apabila ada salah kata. Tahun 2022 sudah menjadi tahun-tahun akhir masa politik kita, jadi semua harus saling komitmen dan kerja sama, baik mitra maupun Komisi IV.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih, Ibu Alien.

Tadi saya diingatkan mengenai kasus di Muntawir PPU. Tolong nanti Bu Menteri, Pak Dirjen penjelasannya, kami ingin mendengarkan semua, juga pertanyaan-pertanyaan Teman-teman yang lain.

Kami persilakan Bu Menteri memberikan tanggapannya atas pertanyaan dari Anggota Komisi IV.

Terima kasih.

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih.

Pimpinan yang kami hormati,
Ibu/Bapak Anggota yang kami hormati,

Saya mencatat semua di dalam catatan saya, ada 27 lembar, 27 halaman, dan saya mohon izin nanti menjawab secara lengkap, secara tertulis dan beberapa *highlight* kami coba jelaskan pada saat ini.

Pertama, dari tadi tentang PNGHS, kemudian mewakili dari berbagai taman nasional yang anggarannya rendah, saya dan Pak Wamen kemarin berkonsultasi kepada Ibu Menkeu untuk mendapatkan dukungan berbagai kekurangan didalam pendanaan, apalagi taman-taman nasional kita punya peluang untuk menjadi ekowisata, spot-spot ekowisata yang sebetulnya bisa juga mengembalikan PNBPN. PNGHS termasuk yang konstruksinya dengan SBSN sistem sukuk dan memang kami memahami dari penjelasan Ibu Menkeu bahwa memang KLHK yang harus lebih aktif, lebih rajin menggali peluang-peluang untuk pembangunan yang bisa mengembalikan PNBPN di berbagai taman nasional yang tempatnya bagus-bagus.

Jadi, yang terhormat Pak Ketua tadi menyampaikan hal tersebut. Pilihan lain adalah kami langsung rapat kemarin setelah dari Ibu Menkeu yaitu menggali dari BBHDR. Tadi yang terhormat Ketua juga menyinggung soal dana reboisasi dan lain-lain, itu memang sudah beberapa tahun BBHDR akhirnya masuk ke APBN dan pemanfaatannya ditegaskan di dalam APBN dan kami sudah rapatkan kemarin bahwa kita akan memberitahukan kepada daerah untuk secara rinci bahwa BBHDR itu bisa dipakai untuk apa saja. Dana BBHDR sekarang ada kira-kira 4,2 ya, Pak Bambang? 4,8? 4,6? 4,6 triliun, Pimpinan dan Ibu/Bapak Anggota yang terhormat, dan yang terbesar sebetulnya di Kalimantan Tengah, ada beberapa Provinsi yang BBHDR-nya besar-besar yang tidak dipakai-pakai begitu. Jadi, sampai tahun 2022 ini kami akan memberikan arahan untuk percepatan. Dan tadi berbagai catatan, saran dari yang terhormat Pimpinan dan Anggota diantaranya saya lihat bisa didukung

dengan dana BBHDR. Sebetulnya buat pemerintah daerah itu memang yang paling penting *sih* arahnya juga *gitu*, jadi dia tahu musti *ngapain* dan mau bagaimana dan dia nanti ketika melaksanakan tidak terganggu oleh aparat penegak hukum karena ketidaksesuaian atau karena interpretasi-interpretasi yang tidak sesuai.

Kemudian saya berterima kasih atas beberapa apresiasi dan saya mohon izin juga menjelaskan bahwa realisasi 96,6% dari rencana kami sembilan puluh tujuh koma sekian persen itu secara kinerja itu tercapai tetapi secara keuangan memang karena ada dana pegawai yang *enggak* dipakai, karena *kan* sudah *kebayar*, gaji terbayar, pemeliharaan terbayar dan lain-lain, jadi posisinya di situ. Dan saya sepakat tadi dengan arahan dari Anggota bahwa seharusnya memang distribusi serapan anggaran itu lebih merata itu lebih baik dari triwulan ke triwulan, jadi bukan di ujung. Jadi kami sedang berusaha terus, Ibu. Terus kita sedang berupaya, saya juga mencoba bersama Bu Irjen untuk setiap triwulan itu melakukan evaluasi. Jadi saya kira bukan hanya KLHK saja, pemerintah saya lihat juga Bapak Presiden yang terhormat selalu juga menegaskan hal tersebut. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas catatan ini.

Kemudian tentang penertiban dan pencabutan izin di dalam SK 01 sebetulnya tidak terburu-buru juga, Ibu Alien Mus yang terhormat, karena kita sudah lakukan beberapa keputusan izin itu juga sejak tahun 2016 itu sudah dilakukan. Maka di dalam SK itu ada lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3. Jadi itu adalah sebuah proses dalam rangka penertiban dan sampai ujungnya itu pencabutan. Jadi dasar-dasar hukumnya ada di undang-undang, di PP dan sebagainya. Nanti saya secara khusus akan menyampaikan kertas posisi tentang hal ini kepada Bapak/Ibu Anggota yang terhormat yang memerlukan dan nanti bisa melalui Sekretariat Komisi IV.

Tentang sertifikat SPLK dan FSC, FSC itu adalah sebetulnya sertifikat *business to business* dan SPLK itu mandatori dari pemerintah. Kita sedang bersama Asosiasi Pengusaha Hutan itu sedang mendalami dan untuk melakukan negosiasi tentang hal ini. Memang *sih* ada istilahnya perilaku konsumen dan ini bukan hanya di soal sertifikat kayu, ini juga terjadi terkait dengan hal-hal yang lain. Jadi perilaku konsumen dengan *Governing Procedure* atau hal-hal yang menjadi ketentuan pemerintah itu mestinya bisa sejalan. Ini yang kita lagi-lagi juga sedang terus pelajari dan sedang kembangkan.

Tadi yang terhormat Pimpinan dan Anggota juga banyak mempertanyakan hal-hal yang terkait dengan perubahan iklim, hutan, deforestasi dan emisi karbon. Saya berterima kasih atas berbagai catatan dan yang saya sudah catat dan nanti kami perhatikan akan kami dalami bersama-sama secara internal dan kita dengan kebijakan yang sudah ada sejak tahun 2015-2016 itu sampai dengan sekarang, maka hal-hal yang penting tadi juga sudah disampaikan oleh beberapa Anggota yang terhormat yaitu terkait dengan rehabilitasi atau RHL, kemudian kebakaran hutan dan lahan, mangrove, perhutanan sosial, pembangunan ruang terbuka hijau atau aforestasi dan restorasi ekosistem, jadi beberapa ini kita sudah coba lagi untuk

introduksi baru yaitu RTH dan restorasi ekosistem. Kita mulai di beberapa kota, di Indramayu, di Karawang, di Purwakarta juga ada, sebagian di Bogor, kemudian kita sedang *develop* lagi di Dumai, Pelalawan dan sebagainya. Jadi moratorium juga hutan primer dan gambut menjadi bagian penting dan *Law Enforcement*. Jadi bagian-bagian ini sebetulnya yang menjadi apa namanya pendekatan kita didalam mengatasi persoalan-persoalan hutan, iklim dan emisi karbon.

Kemudian, Ibu dan Bapak yang terhormat, saya dari awal sudah mencatat masalah-masalah spesifik daerah, aspirasi daerah dan sebagainya, beberapa yang terkait dengan persoalan-persoalan khusus, kasus seperti spesifikasi daerah, kecamatan, desa, kelompok masyarakat dan sebagainya, mohon nanti data spesifik bisa dikomunikasikan oleh tenaga ahli dengan Biro REN kami, sehingga bisa kita tindaklanjuti. Kemudian juga seperti tadi Sumatera Selatan, Aceh dan untuk Aceh Dirjen Gakkum sudah konsultasi dengan Menteri Keuangan, nanti saya kira bisa diberikan jawabannya, Pak Salim yang terhormat. Ada Jabar tadi Ibu Endang, kemudian Banten tentang Tahura, saya sudah baca suratnya, saya akan cek kembali dan kami akan tanyakan dan bahas bersama Dirjen KSDAE. Maluku Utara juga, Ibu Alien Mus yang terhormat, nanti tinggal dilihat peluang-peluang atau potensi-potensi konflik tersebut.

Kemudian saya berterima kasih tadi dukungan untuk generasi muda agar terlibat, *youth gitu*. KLHK sudah mulai mengembangkan program-program dan akan lebih intensif kami kira di tahun ini dan ke depan dengan keterlibatan generasi muda bersama-sama dengan beberapa LSM dan kita akan kerjakan. Juga nanti di G20 itu juga ada *Forum Youth 20* yang saya sudah minta Bu Dirjen Iklim untuk mengakomodir dan bisa memberikan dukungan.

Bang Pesona, saya berterima kasih bahwa memang prinsipnya perhutanan sosial itu pendekatannya adalah akses lahan yang pertama, yang kedua kesempatan berusaha dan yang ketiga kapasitas manajemen. Jadi perhutanan sosial sebetulnya *sih* ada tingkatan-tingkatannya sampai yang sudah bisa jadi eksportir dan sudah bisa menjadi wirausaha Bumdes dan lain-lain yang sudah masuk ke entitas bisnis. Untuk itu maka di Jawa nanti, tadi ada pertanyaan tentang hutan sosial di Jawa, kalau dia sudah bisa masuk di entitas bisnis, maka nanti dia polanya menjadi kerja sama dengan Perhutani. Tapi kalau masih perhutanan sosial, maka dibinanya oleh pemerintah, begitu kira-kira.

Kemudian saya berterima kasih tadi beberapa catatan tentang usulan-usulan terhadap kajian, misalnya bagaimana korelasi antara APBN dan langsung ke indikator KLHK. Jadi saya akan minta nanti ke Sekjen untuk *develop* dari data yang ada untuk sampai bisa menjawab. Sosialisasi Bimtek saya kira ini Bimtek program-program LHK ini menjawab tadi pendekatan kami, saya sangat mendukung untuk ini, karena saya kira pendekatan kepada *grass root* memang akhirnya menjadi sangat penting.

Kemudian tentang mangrove, tadi ada pertanyaan bahwa ternyata datanya belum ada usulan anggarannya di 2022. Saya mohon izin melaporkan,

mangrove ini memang direncanakan untuk bisa mendapatkan dukungan anggaran dari *World Bank*. Kemarin saya dan Pak Wamen sudah berkonsultasi ke Ibu Menkeu dan memang ada rencana untuk dukungan dari *World Bank* dari tahun 2022 ini sampai dengan tahun 2026, itu kira-kira dananya antara 200 sampai 400 juta US, nanti pembahasannya baru diawali dan nanti Februari sudah akan dilakukan pembahasan yang intensif. Kalau semua berjalan mudah-mudahan di bulan Juni-Juli itu akan ketahuan dan sekaligus dalam kaitan itu tadi menyambut usulan dari yang terhormat Anggota bahwa dana pencadangan tadi yang disampaikan oleh Pimpinan itu kita coba reserve nanti ke program-program berbasis masyarakat dan mungkin diantaranya kita harus dorong ke mangrove juga. Jadi program berbasis masyarakat yang lokasinya kira-kira mangrove, nanti kita akan formulasikan akan seperti apa.

Saya berterima kasih catatan Pimpinan tentang IKN, KLHK memang terlibat didalam IKN pada saat pengarahannya untuk kajian lingkungan hidup strategis, juga pada saat dukungan konfirmasi dan penegasan tentang *sustainability*, jadi kota yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami berterima kasih. Untuk dukungan kita akan terus melakukan pengendalian, kontrol untuk kondisi kehutanan dan juga apa namanya ancaman terhadap kondisi air, ancaman terhadap lingkungan terutama dari aktivitas tambang tidak hanya di kompleks IKN tetapi di Kabupaten/Kota yang terdekat.

Pimpinan dan Ibu/Bapak Anggota yang kami hormati,

Saya mohon izin melaporkan bahwa sebetulnya sudah 2 tahun ini KLHK membantu Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) untuk penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penanganan Pasca Tambang atau Penambangan, judulnya kira-kira sekitar itu dan terutama sebetulnya yang paling terkait adalah Kementerian ESDM dan KLHK. Penambangan tanpa izin memang bukan hal yang mudah dan selalu ujung-ujungnya di-*address* ke KLHK. Seperti kita pahami bersama bahwa ada persoalan-persoalan juga di regulasi yang oleh beberapa gubernur juga ditanyakan dan dikonsultasikan kepada kami dan nanti kita akan ikuti terus dan saya memahami dan mengerti bahwa KLHK memang harus apa namanya harus tidak terjebak pada komplikasi-komplikasi yang ada, yang penting apa namanya sedapat mungkin mengurangi ancaman-ancaman dari penambangan tanpa izin tersebut. Jadi saya sudah bicara dengan Gubernur Riau, Gubernur Babel dan sebagainya tentang ini dan kami sangat memahami itu dan kami memperhatikan. Nanti secara khusus apabila diperlukan Rancangan Perpres versi terakhirnya saya bisa laporkan kepada yang terhormat Pimpinan.

Tentang bioprospeksi ini juga sesuatu yang menjadi perhatian kita, saya berterima kasih atas dukungan ini. Pak Dirjen KSDAE sedang menyiapkan fasilitas untuk pengembangan bioprospeksi ini. Kami sepakat bahwa jangan sampai sumber daya genetik kita diambil atau terambil oleh asing karena kita tidak kokoh, kurang kokoh atau lengah dan sebagainya atau justru tidak memanfaatkan. Sekarang Dirjen KSDAE sedang menghimpun pengetahuan dan pandangan-pandangan tentang bioprospeksi dari sisi kelembagaan, pemanfaatan, produksi, fasilitas dan sebagainya.

Kemudian saya juga mohon izin melaporkan bahwa balai-balai besar itu di KLHK itu Eselon II. Jadi kalau Eselon II dia jabatannya akan ke Eselon I, kemudian begitupun sebaliknya. Jadi kalau Eselon I-nya belum ketahuan siapa yang jadi, Eselon II-nya belum ketahuan juga siapa yang harus jadi begitu, nanti akan ke Eselon-III. Jadi ada perhitungan-perhitungan gerbong seperti itu juga dan saya akan cek menurut peraturan itu bidingnya sulit dilakukan apabila tempatnya belum kosong begitu, Pak Sekjen ya. Saya akan cek lagi, Pimpinan, aturan tentang ini. Karena justru gerbong, per gerbong, per gerbong begitu, jadi kalau dia sudah keburu diisi dan sebagainya, ini karena mesti diatur benar begitu, jadi tidak ada maksud apa-apa. Kami akan perhatikan tentang ini, Pimpinan, karena apa Namanya, saya *sih* minta Pak Dirjen sebetulnya bisa kontrol begitu karena...

KETUA RAPAT:

Bu Menteri, saya mau tanya.

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Iya, Pak.

KETUA RAPAT:

Berapa kepala balai yang Plt?

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Ada 12, Pak Sekjen? Kalau tidak salah 12. Kami sudah cek, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terus kalau 12 itu pertanggungjawabannya *gimana* nanti perihal keuangan dan lain-lain?

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Kewenangannya ada, Ketua. Jadi itu sebabnya karena dia terkait gerbong dan orang-orang ini harusnya peluang untuk posisi definitif, jadi, dan sementara gerbong di atasnya belum bergerak. Jadi itu sebetulnya yang terjadi, Ketua. Saya akan cek *lah*.

KETUA RAPAT:

Bukan, seharusnya *kan* ada misalnya 6 bulan lagi Eselon II-nya habis, sedangkan Eselon I-nya setahun lagi habis, *kan* sudah harus diganti *dong*.

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Di PP-nya tidak boleh, Ketua, tidak boleh biding dulu kalau belum kosong tempatnya. Itu saya persoalkan juga sebetulnya kenapa *enggak*...

KETUA RAPAT:

Sekarang seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, *kan* masih Plt. Kecuali Taman Nasional Waykambas, sudah definitif.

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Kami akan cek, Ketua. Nanti saya coba percepat di Februari *deh* secepatnya, Ketua, sambil nanti kita lihat yang di...

INTERUPSI F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pak Ketua, izin.

Gunung Pangrango juga.

Terima kasih.

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Karena orangnya pindah ke Kalimantan Utara. Ya, Ketua, kami perhatikan, nanti saya coba cek.

Kemudian yang surat-surat resmi tadi sudah. Kemudian tentang Cilacap, Perhutani dan sebagainya pada dasarnya apa namanya Perhutani itu memang punya PSO, kita sedang evaluasi dan tadi juga beberapa Tahura, profesi dan sebagainya kita sedang tata. Cilacap misalnya tadi permintaan. Jadi begini, di kita berdasarkan PP 23 itu juga ada namanya penataan kawasan. Jadi sedang dilihat betul sebetulnya di kawasan-kawasan mana yang betul-betul padat penduduknya dan sebagainya dan yang sudah harus benar-benar bisa dilepas dan menjadi milik masyarakat, itu sedang dilakukan sekarang oleh Direktorat Jenderal. Kemudian saya akan cek kembali semua temuan dari hasil Kunker tahun 2020-2021 nanti bersama Pak Wamen.

Demikian, Pimpinan, yang bisa kami sampaikan secara lisan, nanti bentuk tertulis kami berikan.

Terima kasih.

INTERUPSI F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Matiin dulu, *mic-nya matiin* dulu.

INTERUPSI F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan...

KETUA RAPAT:

Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Menteri LHK beberapa hal tadi ya. Saya juga tergelitik LHK akan mengambil kembali tanah yang dikelola Perhutani 1,1 juta hektar di Pulau Jawa. Jujur saya *enggak* setuju. Nanti kalau perlu kita voting seluruh fraksi pun tidak akan setuju. Kenapa *sih* pemerintah ini tidak membangun *Food Estate* di Pulau Jawa yang tanah-tanah yang tadi yang mau diambil itu? Kenapa harus membangun di Kalimantan Tengah? Kenapa harus di Papua? Kenapa harus di Humbang? Jangan sampai nanti kegagalan yang lalu terulang kembali. Contoh Kementerian Pertanian membeli kapal angkut sapi dari NTT ke Jakarta, *nongkrongnya* 10 hari itu, Bu, kapalnya sampai isinya 400 ekor, sampai Jakarta harganya 3 kali lipat ongkos angkut dari Australia ke Jakarta. Ini *loh*, kenapa *sih* tidak kordinasi? Di Pulau Jawa ini *kan* yang pasar terbesar hampir 60% lebih Pulau Jawa. Ini *loh* yang menjadi kegelisahan saya. Kemarin waktu terjadi banjir lahar panas di Lumajang, saya juga mendengar langsung dari Pak Bupati bahwa lahan Perhutani akan dijadikan untuk realokasi pemukiman. Saya setuju. Tapi kalau tiba-tiba 1,1 juta hektar dijadikan perhutanan sosial, tolong dikaji. Tidak lama lagi tahun politik, saya hanya mengingatkan saja.

Yang kedua, tadi perihal data di situ juga pernah saya katakan berapa ratus pemegang IPTKH tidak membayar kewajiban, sampai hari ini pun belum diberikan. Di situ juga tadi yang kesimpulan tadi juga ada, berapa banyak yang dicabut dan sepertinya brutal mencabutnya, ada yang punya HGU pun dicabut. Saya banyak dikomplain oleh orang. Saya bilang, "Kamu jangan banyak *ngomong!* Kamu datang ke Komisi IV, kamu audiensi, kamu bawa surat menyurat kamu secara lengkap." Jadi kalau hanya *ngomong tok* tidak ada gunanya saya bilang. Kalau saya bicara ini bicara fakta, bicara surat, bukan bicara lain-lain, ini yang paling penting. Jadi nanti kita putuskan Rabu atau Kamis datanya siap semuanya ya, yang 3,2 juta hektar kita anggap dipotong 600 ribu untuk masyarakat, milik kebun sawit, milik rakyat, nanti kita tinggal tunggu 3,2 dikurang itu, paling tidak ada nanti 2,6 atau 2,5 atau berapa.

Ya, Pak Khalid. Mau *ngomong* apa, Pak Khalid?

F-P.GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Terima kasih, Ketua.

Langsung saja. Tadi dari penjelasan Ibu Menteri ada beberapa pertanyaan dari Gerindra dan juga dari Pak Dedi tadi menyangkut BBTNGL yang belum maksimal. Kami perlu mendengar kenapa ceritanya setahun belum ada sedikit pun pergerakan. BBTNGL setelah pemindahan tadi ada pertanyaan dari Fraksi Gerindra dan juga ada dari Pak Dedi, juga dari Pak Salim Fakhry menyangkut belum maksimalnya atau belum berjalannya BBTNGL. Tadi saya tidak mendengar penjelasan sedikitpun, maka tadi Ibu mungkin lupa, maka saya sela tadi. Mungkin mendapat penjelasannya saja sedikit, karena masyarakat tanya.

KETUA RAPAT:

Ibu, tolong dijawab. Bu Alien mau *ngomong* apa? Sekalian dijawab.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Tadi *kan* saya menanyakan soal masalah Mentawir.

KETUA RAPAT:

Buka dulu biar jelas.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ini suka dipotong-potong, lupa lagi apa yang mau diomong. Jadi, Ibu Menteri, mohon maaf, memang saya minta pernyataan dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup tentang masalah di Mentawir karena memang menjadi masalah dan ini juga tentunya menjadi atensi karena IKN rada di Kaltim nanti. Di wilayah itu pun yang akan masuk jadi wilayah IKN yang sudah tercemar, air bersih dan sebagainya.

Kemudian, Pak Ketua, saya mengingat bahwa kemarin kita meminta data dari Perhutani, katanya sebelum Rapat KLHK datanya sudah harus sampai, biar kita tanya itu.

KETUA RAPAT:

Data apa itu?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Data luas lahannya Perhutani sebenar-benarnya dari 2,2 itu. Itu saja, Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Tadi urusan masalah tambang itu anda *ngomong* sendiri atau jadi juru pembicara yang di belakang itu?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Yang mana, Pak? Jangan Bapak memanas-manasi.

INTERUPSI F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E, M.M.):

Ketua, kiri.

KETUA RAPAT:

Apalagi, Pak Salim?

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E, M.M.):

Ini sudah dingin, Ketua. Tadi pagi agak panas, ini sudah sejuk. Cuma saya mau tanya ini, Ketua, sebelum kesimpulan dan rapat ditutup. Tadi ini kita janji diperbesar. Bukan maksudnya aspirasinya diperbesar, ini hurufnya ini, Ketua, cuma tidak diperbesar. Makanya kita ini rapat tidak pernah konsisten.

KETUA RAPAT:

Tadi saya ke Sekretariat tidak dengar saya ngomong? Mana?

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E, M.M.):

Apalagi saya tidak pakai kacamata.

KETUA RAPAT:

Pak Salim, yang lain sudah dapat, Pak Salim belum dapat. *Gimana?*

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E, M.M.):

Tidak ada satu pun. Saya sudah tanya, Ketua.

KETUA RAPAT:

Mana?

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E, M.M.):

Belum kita minta sama Ibu itu untuk angka diperbesar. Huruf saja tidak bisa diperbesar.

Yang kedua, Ketua, tadi masalah aspirasi saya itu tidak ada dijawab, Bu. Memang kecil itu, Bu, dananya sekian tiga paket. Cuma apakah uangnya sudah cair? Nanti mungkin, Bu, dalam jawaban, sebab Ibu ini ketika memberikan penjelasan Pak Sekjen selalu seolah-olah paham semua, cuma *kok* tidak dijawab kecuali pertanyaan yang melebar, Ketua. Ini hanya pertanyaan ada aspirasi saya tiga paket, satu pun tidak siap, apakah uangnya dicairkan atau bagaimana. Tadi pagi sudah naik sedikit. Saya sudah turun, ini mau naik lagi, Ketua.

KETUA RAPAT:

Mau naik ke atas?

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E, M.M.):

Sudah itu yang ketiga, Ketua.

KETUA RAPAT:

Apalagi?

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E, M.M.):

Ada perusahaan tadi yang minta keringanan.

KETUA RAPAT:

Sudah dijawab.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E, M.M.):

Itu berarti saya lupa.

Khalid ini bukan dia yang hadapi, Ketua, *kok* Khalid yang jawab, Ketua. Ya, jadi ininya, ini Bu, pertanyaan kecil Bu cuma efeknya luar biasa, Bu. Ini tidak siap. Ketika ditelepon, Bu, pihak ketiganya nama CV-nya pun ada di sini ini, Bu, cuma ini apakah ini, ketika TA saya menelpon tidak diangkat lagi, Bu. Atau ini saya adukan ke APH, mana Dirjenjnya, jawab.

KETUA RAPAT:

Sudah bisa baca belum? Dilihat dulu.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E, M.M.):

Kecil. Belum.

KETUA RAPAT:

Saya lepas kacamata saja saya bisa lihat, Pak. Itu, Pak.

INTERUPSI F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Sedikit, Ketua.

Ini perlu ada Ibu Menteri, *kan* bisa langsung memberikan penjelasan sedikit terhadap isu satu juta lebih milik Inhutani akan diambil alih oleh KLHK. Perhutani, iya. Apa benar ini tidak? Supaya jangan jadi isu yang liar.

Demikian, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan, Bu Menteri, dijawab dulu.

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Yang tentang TNGL dulu, TNGL Pemindahan Kantor Balai Besar TNGL dari Medan ke Banda Aceh menunggu perubahan-perubahan lampiran berkaitan dengan tata kerja pelaksanaan teknis taman nasional. Jadi kemudian perubahan peraturan menteri itu akan diikuti dengan perubahan operasional dan sistem keuangan. Jadi memang ada proses administrasinya yang masih berjalan. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan balai besar TNGL saat ini terkait persiapan pemindahan kantor adalah telah melengkapi keperluan kantor balai yang terdiri dari mabler, berapa set peralatan kantor dan lain-lain, menugaskan tim secara bergilir untuk menjalankan operasional pelayanan di Banda Aceh. Jadi menyediakan akomodasi sementara rumah sewa untuk operasional tim pelayanan di Banda Aceh. Jadi posisinya seperti itu. Organisasi UPT-nya sedang dibahas dengan kantor Menpan, Pak. Jadi kalau sudah ada persetujuan Menpannya nanti dia akan operasional.

Kemudian soal tadi yang tiga pesantren, Pak Dirjen, Pak Sigit, tangani saja, dipanggil saja, karena ada foto-fotonya, ada segala macam. Jadi tinggal di-*cross* saja mendingan daripada informasinya di sini berbeda, di sana berbeda. Saya kira diini saja, Pak, turun ke lapangan saja kalau perlu.

Kemudian saya mungkin harus menjelaskan yang tentang Perhutani. Di dalam PP 72 itu sebetulnya ditegaskan oleh PP bahwa wilayah kerja Perhutani adalah kawasan hutan selain kawasan konservasi. Dan sebetulnya Perhutani itu pemegang izin kehutanan, sama seperti pemegang izin yang lain. Tapi, ada tetapinya, rupanya sejak lama itu belum pernah ada surat atau keputusan dari Menteri Kehutanan tentang wilayah mana yang dikerjakan oleh Perhutani. Jadi kalau istilahnya pemerintah menarik atau KLHK menarik kawasannya dari Perhutani itu tidak benar juga istilah itu, tidak ada yang ditarik karena dikasih saja belum pernah. *Nah*, persoalannya adalah saya kira Perhutani juga paham betul bahwa Bapak Presiden mengatakan bahwa Perhutani tidak boleh bisnis dengan rakyat. Oleh karena itu, perhutanan sosial tidak boleh lagi menjadi bisnisnya Perhutani, karena Pak Presiden bahkan sangat tegas mengatakan *kok* bisa jadi lebih kolonial dari kolonial, jadi sebetulnya ada maknanya di situ. Perhutani diminta untuk konsentrasi kepada perspektif bisnis dan saya mencoba memahami bahwa mungkin tidak hanya kayu jati *lah* kalau bicara prospek bisnis, karena dia kayak getah dan lain-lain ini juga penting buat dia, kemudian ekowisata juga penting buat dia.

Oleh karena itu, kebijakannya adalah perhutanan sosial murni tidak lagi dikelola oleh Perhutani. Jadi tinggal dilihat wilayahnya yang mana saja. Tapi, ada tapinya, wilayah-wilayah perhutanan sosial yang selama ini kerja sama-kerja sama dengan Perhutani setiap 2 tahun dan dia sudah berkarakter bisnis sebagai entitas bisnis ya ditingkatkan *aja* jadi entitas bisnis dengan Perhutannya, jadi kerja sama, begitu, itu posisinya. Dan tidak benar bahwa yang keluar dari kelola Perhutani bukan ditarik wilayahnya ya, berbeda

sensingnya. Wilayah-wilayah yang keluar dari garapan Perhutani itu bukan hanya untuk hutan sosial, tetapi juga untuk tadi penataan kawasan. *Kan* tadi ada yang diminta untuk dijadikan pemukiman, ada yang minta untuk menjadi TORA. Mana yang bisa jadi punya rakyat ya punya rakyat, mana yang bisa ekowisata punya Pemda, Pemda perlu apa itu di situ. Jadi posisinya seperti itu, Bapak. Kami mungkin akan kirimkan lagi-lagi kertas posisinya saya kira supaya jelas betul yang kita persoalkan ini.

Kemudian yang terhormat Ibu Alien, yang di Mentawir PT. PDCI ya? Itu sudah dipanggil oleh Gakkum, sudah dilakukan pemeriksaan. Jadi sekarang sudah berjalan dan masih akan dipanggil kembali dan di sisi lain Gakkum sedang melakukan pengumpulan data lapangan, mengambil sample dan diskusi konsultasi dengan para ahli.

Demikian, Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi nanti tolong Sekretariat dijadwalkan PT yang di Mentawir itu dipanggil ke sini, kita adakan RDPU. Karena kalau tadi Ibu Menteri mengatakan sudah pengambilan sampel atau apa, sedangkan Pimpinan saya itu sudah ke lokasi itu yang pakai pakai masker itu, ke lokasi bersama tim Komisi IV. Jadi saya minta jadwalkan, panggil ke sini pemilik dan direktur utamanya yang bertanggung jawab dan ini masih banyak lagi yang akan kita sidak. Apapun bentuknya kalau merusak alam ya kita lihat saja nanti. Iya, nanti kalau Gakkumnya takut ya Gakkumnya suruh berhenti, itu saja. Makanya saya selalu mengatakan sama Gakkum, "Kalau anda takut, bawa kami Komisi IV", itu saja. Kenapa takut kalau untuk kebaikan *kok*.

Kalau tidak ada lagi...

INTERUPSI F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ketua, tidak lebih dari 1 menit.

KETUA RAPAT:

Bawel banget hari ini. Ya udah.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Mengingatkan saja, Bu Menteri. Kemarin Panja KSDAE sudah masuk di Badan Legislasi dan sudah disampaikan sesuai dengan pertemuan kita sebelumnya, sebenarnya kita harus mengadakan satu *discussion*, FGD, tapi tidak terjadi. Mungkin di sana bisa dilakukan penyesuaian yang diusulkan juga oleh Bu Menteri dan tim dan semoga bisa menjadi satu referensi yang kuat untuk kita legalkan secepatnya agar perubahan konservasi untuk Undang-

Undang 5 Tahun 1990 itu memang benar-benar sesuai dengan harapan kita bersama.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu Alien, sudah diingatkan.

Jadi di dalam revisi Undang-undang 5 Tahun 1990 itu saya yang memohon, saya yang meminta kepada tim tidak ada kata-kata 'maksimum'. Maksimum itu tidak ada bagi saya, maksimum 2 tahun *bla, bla, bla* setahun keluar, denda setinggi-tingginya 500 juta, 100 juta, tidak ada! Minimal 10 tahun, minimal hukuman denda 10 miliar, sudah, tinggal kita pecah yang berguru siapa, yang nangkap siapa, yang bawa siapa, yang makelar siapa, yang membeli siapa. Kalau tidak begitu tidak akan ada efek jera. Contoh kemarin yang Ibu Menteri sama saya ke Lampung melihat orang utan dihukum 2 tahun, belum tentu dia di dalam sel 2 tahun, denda 100 juta, karena masalah ini saya ikuti terus terhadap itu. Bahkan kemarin saya bicara sama Pak Dirjen KSDAE ya di Pelabuhan Bakaheuni itu 1 bulan minimal 10 ribu ekor burung ditangkap oleh karantina Pertanian. Saya minta dan diskusi kalau perlu nanti Dirjen KSDAE, Gakkum membuat surat kepada karantina untuk dibawa ke tempat pelepasan liar. Ini kemarin dulu apa tidak lucu saya mendengarnya, langsung saya marah di Lampung, "Dilepasnya di mana?" "Itu loh dekat pintu tol Kota Baru." Ampun. Saya bilang, "Mulai hari ini kalian kalau mau lepaskan lapor saya dulu." Masa' dilepas di Kota Baru didekat pintu tol. Coba kalau ada Gakkum, sudah ada MoU dengan Polda, sudah dengan karantina. Saya maunya misalnya satu wilayah misalnya Pangrango, Gunung Salak, yang penting ada berita acara, tidak untuk diperjualbelikan, dibawa, dilepas-liarkan. Karena saya yakin dengan hidup di sana mereka lebih nyaman. Karena semua selundupan burung itu berasal dari Sumatera untuk dibawa ke Pulau Jawa. Tapi untungnya *enggak* ada monyet Lampung yang diselundupkan ke Jakarta. Hanya becanda, Pak Salim, jangan marah *dong*, dibilang monyet langsung marah.

Bu Anggi, tugas anda membacakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Siap, Ketua.

Baik.

Bapak dan Ibu Para Anggota, Bu Menteri dan semua jajarannya,

Kita masuk ke kesimpulan, saya akan bacakan:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran tahun 2021 serta rencana program kegiatan dan anggaran tahun 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk mengevaluasi dan menyusun ulang rencana program dan kegiatan anggaran tahun 2022 dengan lebih cermat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok, menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup serta mengelola dan melestarikan hutan disamping memberikan dukungan untuk peningkatan ekonomi masyarakat terutama masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang akan dibahas lebih detail bersama Eselon I pada rapat berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para Anggota? Ibu Menteri?

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Setuju, Ketua.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas pencadangan anggaran *Automatic Adjustment* pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sebesar Rp281.963.941,000-. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar program dan kegiatan yang terkena pencadangan anggaran atau *Automatic Adjustment* adalah kegiatan yang paling sedikit tidak berdampak langsung terhadap upaya peningkatan ekonomi masyarakat terutama masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Para Anggota? Ibu Menteri?

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Setuju, Ketua.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sepakat untuk melaksanakan Rapat Kerja pada minggu pertama bulan Februari 2022 untuk membahas perusahaan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan serta Perusahaan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau IPPKH yang

belum melaksanakan kewajiban-kewajibannya, sebagaimana butir 5 kesimpulan RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove tanggal 29 November 2021.

Para Anggota? Ibu Menteri? Ketua?

KETUA RAPAT:

Ini nampaknya *kan* untuk membahas perusahaan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan yang tanpa prosedur, tanpa pinjam pakai, tanpa pelepasan kawasan hutan, itu beda. Yang di bawah itu *kan* IPPKH. Ya silakan bantu itunya.

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Ininya teksnya tanpa prosedur pelepasan kawasan. Mungkin tidak kalau kita di Rapat Panja dulu saja, Ketua? Karena saya mungkin harus menguraikan begitu dalam dan sangat rinci.

KETUA RAPAT:

Anggota bagaimana?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Di Panja saja.

INTERUPSI:

Hanya kalau Panja terbatas, tidak semua Anggota terlibat di dalam Panja itu, itu saja masalahnya.

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Izin, Ketua.

Mungkin ada prosedur Panjanya mengundang Anggota lain atau Poksi.

INTERUPSI:

Izin, Pimpinan.

Usul...

KETUA RAPAT:

Kalau begitu atas kesepakatan teman-teman seluruh fraksi ya, kita nanti rapatnya di Panja, tolong dijawab.

INTERUPSI:

Ketua, cuma PKS tidak ada ini, Ketua.

KETUA RAPAT:

Eenggak usah mikirin yang eenggak ada, ngapain.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ketua, menurut saya ini tetap saja dimasukkan sebagai kesimpulan, tapi nanti untuk spesifik permasalahan kita bahas di Panja, itu biar menjadi atensi kita dalam rapat.

KETUA RAPAT:

Eenggak bisa dong, eenggak bisa.

Jadi ini mungkin, atau sebelum kita Raker kita bahas di Panja dulu. Coba dibikin satu alinea baru kita bahas di Panja, setelah itu baru dibawa ke Raker ya. Saya lihat muka abang enak hari ini, *abis* marah, senyum, marah, senyum.

Nomor 3 dihapus saja, nomor 4-nya Ibu Anggi bacakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Berarti poin 3 tetap ini dulu? Nanti setelah itu baru kita bahas ya, Ketua?

KETUA RAPAT:

Itu bukan minggu pertama kali. Minggu pertama itu tanggal berapa berarti? *Nah* kalau begitu, *kan* minggu kedua itu. Kita buat minggu kedua saja ya? Jadi tidak usah dibahas di Panja, karena di Panja itu tidak bisa mengundang, tidak boleh Tatibnya ya. Bu Alien, eh Bu Alien lagi. Ibu Anggi, dibacakan ulang untuk dimintakan persetujuan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

3. Komisi IV DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sepakat untuk melaksanakan Rapat Kerja pada minggu kedua bulan Februari 2022 untuk membahas perusahaan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan dan yang tanpa prosedur pelepasan kawasan serta Perusahaan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang belum melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana butir kelima kesimpulan RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove tanggal 29 November 2021.

Para Anggota? Ibu Menteri?

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Setuju, Ketua.

KETUA RAPAT:

Setuju? Dijawab pakai *mic* biar direkam.

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Sudah dijawab, Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data terbaru, data nama-nama perusahaan yang belum membayar kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk dibahas dalam Rapat Kerja selanjutnya.

Para Anggota? Ibu Menteri?

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Setuju, Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera merealisasikan program atau kegiatan berbasis masyarakat serta bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan mulai awal tahun 2022.

Para Anggota?

KETUA RAPAT:

Anggota?

INTERUPSI:

Perlu ada koreksi, Pak Ketua. Sumber daya manusia, bukan sumber daya masyarakat, bagi masyarakat.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Oke, iya, benar.

Terima kasih, Eyang.

Bu Menteri?

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Setuju, Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik.

KETUA RAPAT:

Saya imbau dulu kepada Anggota jangan bilang setuju setuju, nanti CPCL-nya kelamaan, nanti belum berjalan CPCL-nya tiba-tiba ada pemotongan lagi yang dikomplain Kementerian. Jadi kalau bisa segera CPCL-nya dimasukkan. Setuju ya?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Siap, Ketua.

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencari alternatif pelaksanaan program atau kegiatan yang sekaligus memberikan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor kehutanan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti butir 4 kesimpulan RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove pada tanggal 29 November 2021 terkait penganggaran minimal sebesar 40% dari PNBP di bidang kehutanan sebagai sumber pendanaan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mendukung pelaksanaan program atau kegiatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Para Anggota? Ibu Menteri?

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Setuju, Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

(RAPAT: SETUJU)

7. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjaga kelestarian hutan dan kualitas lingkungan hidup di lokasi jalur ibukota negara.

Para Anggota? Ibu Menteri?

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Setuju, Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih, Bapak/Ibu.

Silakan, Ketua.

KETUA RAPAT:

Tadi rapat dari pagi agak-agak hangat, kemudian dingin, hangat lagi, dingin lagi, maka kita mencapai kesepakatan bersama. Tapi saya juga minta Saudara Sekjen ya konsekuen sedikit *lah*, apa yang sudah kita sepakati, apa yang sudah kita tanda tangani wajib dijalankan.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Sebelum kita menutup Rapat Kerja hari ini kami persilakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan kata penutup dalam Rapat Kerja hari ini.

MENTERI LHK RI (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih.

Pimpinan yang kami hormati dan yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI,

Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas Rapat Kerja hari ini termasuk dinamikanya dan saya percaya bahwa itu semata-mata ditujukan untuk dan bagi kebaikan dan peningkatan kinerja Kementerian. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan kami. Saya minta maaf atas beberapa hal yang dianggap kurang baik atau dianggap belum pas dan kami akan coba terus memperbaikinya.

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Shaloom,
Om Shanti Shanti Om.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja kita pada hari ini.

Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV mohon maaf apabila selama kami memimpin ada kekhilafan, kekurangan atau kesalahan.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, Rapat Kerja ini kami tutup.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.20 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Drs. ACHMAD AGUS THOMY
NIP. 196508171988031002